



ANALISIS INDEKS DAYA SAING DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2025



ANALISIS
INDEKS DAYA SAING DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, berkah dan hidayah-Nya sehingga Analisis Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Analisis indeks daya saing daerah menjadi salah satu alat yang penting dalam perencanaan pembangunan daerah karena analisis IDSD membantu pemerintah daerah memahami posisi kompetitifnya dibandingkan dengan daerah lain. Selain itu data dari analisis IDSD dapat menjadi masukan ataupun panduan strategis dalam merancang kebijakan pembangunan daerah.

Sejak tahun 2022, pengukuran daya saing daerah merujuk pada hasil pengukuran yang diterbitkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Sesuai pengukuran tersebut, daerah melakukan pemanfaatan analisis IDSD untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih terarah. Dalam hal daya saing, hasil pengukuran Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Wonosobo menunjukkan capaian yang semakin membaik setiap tahunnya meskipun diperlukan perbaikan atau peningkatan pada sejumlah pilar dan dimensi untuk semakin memperkuat daya saing daerah Kabupaten Wonosobo. Upaya meningkatkan Indeks Daya Saing Daerah memerlukan peran penting pemerintah dalam mengarahkan dan mensinergikan berbagai potensi sumber daya yang dimiliki dengan didukung kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi. Di sisi lain, penguatan kolaborasi dengan berbagai *stakeholder (pentahelix)* antar sektor maupun antar daerah juga diperlukan untuk meningkatkan interaksi yang pada akhirnya akan berpengaruh pada peningkatan produktivitas dan daya saing daerah.

Analisis Indeks Daya Saing Daerah ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi atau masukan dalam merumuskan strategi perencanaan pembangunan daerah agar lebih optimal dengan mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi yang dimiliki dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan berkelanjutan.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan serta kerjasama yang baik sehingga penyusunan Analisis Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 dapat terlaksana dengan baik dan semoga menjadi lebih baik pada tahun yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I Profil IDSD Kabupaten/Kota dan Kebijakan Pengembangan Sistem Perwilayahan	1
A. Pembangunan Profil Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten/Kota.....	1
B. Profil Konstelasi Nilai Wilayah Indeks Daya Saing Daerah dan Indikator Makro.....	12
C. Interaksi Sitem Perekonomian dan Pelayanan Umum Perwilayahan	18
BAB II Analisis Permasalahan dan Isu Strategis Daerah	25
A. Kebijakan Perencanaan Pembangunan dan Program Strategis.....	25
B. Analisis IDSD dan Peran Daerah Pada Sistem Perwilayahan dalam Permasalahan dan Isu Strategis	29
BAB III Analisis Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dan Produktivitas Berperan.	34
A. Terobosan Strategi Pembangunan dalam Pengembangan Produktivitas Berperan	34
B. Prioritas Program Pembangunan dalam Pengembangan Produktivitas Berperan.....	41
C. Kebutuhan Pembangunan Sistem Perwilayahan.....	42
BAB IV Tata Kelola dan Dukungan dalam Penguatan Pengembangan Produktivitas Daerah	44
A. Rekomendasi Agenda Kerjasama dan Kolaborasi Dalam Produktivitas Skala Kewilayahan.....	44
B. Rekomendasi Kebijakan Kelembagaan dan Keuangan Daerah dalam Mendukung Pembangunan dalam Pengembangan Produktivitas Berperan dan Sistem Kewilayahan	47
DAFTAR PUSTAKA.....	52

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Skor Komponen dan Pilar IDSD WP Wonobanjar Tahun 2024.....	5
Tabel 1.2 Skor Indikator Pilar (1) Institusi WP Wonobanjar Tahun 2024.....	6
Tabel 1.3 Skor Indikator Pilar (2) Infrastruktur WP Wonobanjar Tahun 2024	7
Tabel 1.4 Skor Indikator Pilar (3) Adopsi TIK WP Wonobanjar Tahun 2024.....	7
Tabel 1.5 Skor Indikator Pilar (4) Stabilitas Ekonomi Makro WP Wonobanjar Tahun 2024	8
Tabel 1.6 Skor Indikator Pilar (5) Kesehatan WP Wonobanjar Tahun 2024	8
Tabel 1.7 Skor Indikator Pilar (6) Keterampilan WP Wonobanjar Tahun 2024.....	9
Tabel 1.8 Skor Indikator Pilar (7) Pasar Produk WP Wonobanjar Tahun 2024	9
Tabel 1.9 Skor Indikator Pilar (8) Pasar Tenaga Kerja WP Wonobanjar Tahun 2024	9
Tabel 1.10 Skor Indikator Pilar (9) Sistem Keuangan WP Wonobanjar Tahun 2024..	10
Tabel 1.11 Skor Indikator Pilar (10) Ukuran Pasar WP Wonobanjar Tahun 2024.....	10
Tabel 1.12 Skor Indikator Pilar (11) Dinamisme Bisnis WP Wonobanjar Tahun 2024	11
Tabel 1.13 Skor Indikator Pilar (12) Kapabilitas Inovasi WP Wonobanjar Tahun 2024	11
Tabel 1.14 PDRB Kabupaten Wonosobo Tahun 2024	18
Tabel 2.1 Analisis Gap, Peran dan Nilai IDSD Kabupaten Wonosobo dalam WP Wonobanjar.....	31
Tabel 3.1 Keterkaitan Upaya Super Prioritas (<i>Game Changer</i>) dan Pilar IDSD	40
Tabel 3.2 Program Prioritas Pembangunan	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Skor IDSD Kabupaten Wonosobo dan Skor Rata-Rata IDSD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2024	2
Gambar 1.2 Indeks Daya Saing Daerah Kawasan Wonobanjar	3
Gambar 1.3 Skor Komponen IDSD WP Wonobanjar 2024	4
Gambar 1.4 Nilai Pilar IDSD WP Wonobanjar	5
Gambar 1.5 Kuadran Nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	12
Gambar 1.6 Kuadran Nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dengan Pertumbuhan PDRB	14
Gambar 1.7 Kuadran Nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	15
Gambar 1.8 Kuadran Nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dengan Kemiskinan	16
Gambar 1.9 Kuadran Nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dengan Capaian Indikator Makro	17
Gambar 4.1 Rekomendasi Agenda Kerjasama <i>Pentahelix</i>	46
Gambar 4.2 Peta Jalan Transformasi	50

BAB I

PROFIL IDSD KABUPATEN WONOSOBO DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM PERWILAYAHAN

A. Pembangunan Profil Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Wonosobo

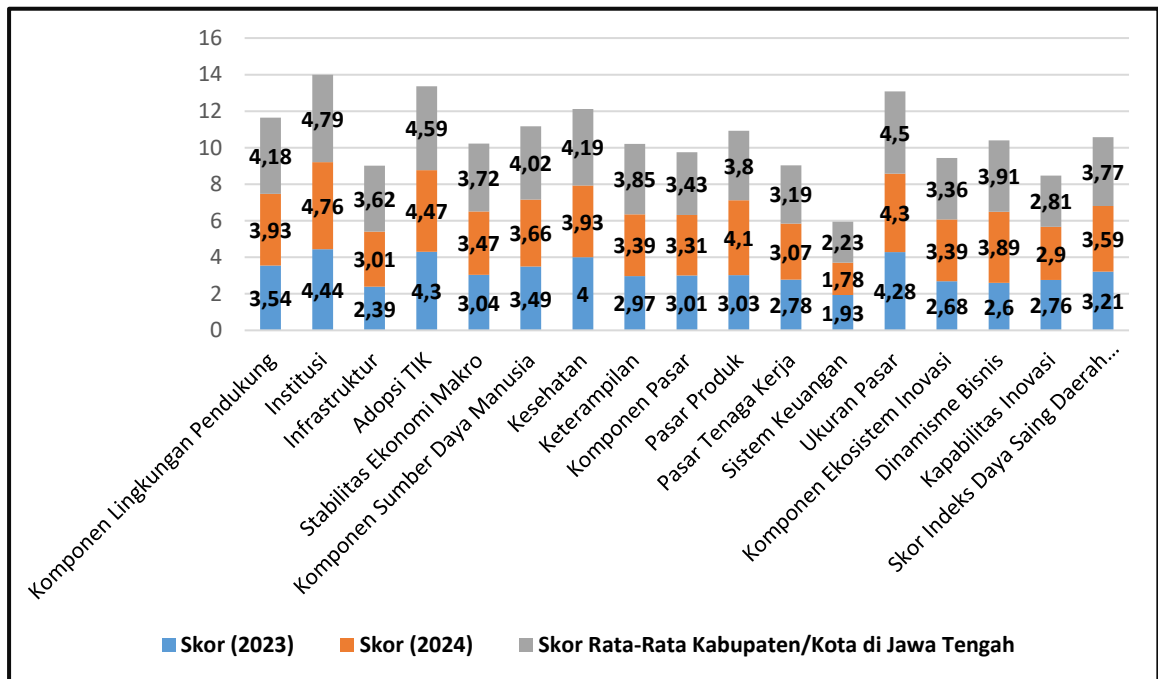
Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki semboyan “Pusakaning Dwi Pujangga Nyawiji” yang merupakan semboyan filosofis atau sengkalan tahun (kronogram) yang merujuk pada angka tahun 1825 Jawa (tahun berdirinya Wonosobo) . Kabupaten Wonosobo berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Magelang dibagian timur, Kabupaten Purworejo dibagian selatan, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Banjarnegara dibagian barat, dan Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal dibagian Utara. Sebagian besar wilayah Kabupaten Wonosobo adalah daerah pegunungan. Bagian timur (perbatasan Kabupaten Temanggung) terdapat dua gunung berapi yaitu Gunung Sindoro (3.136 mdpl) dan Gunung Sumbing (3.371 mdpl). Bagian utara merupakan bagian Dataran Tinggi Dieng dengan puncak tertinggi Gunung Prahu (2.565 mdpl) dan bagian selatannya terdapat sebuah waduk yaitu Waduk Wadaslintang.

Visi Kabupaten Wonosobo yang tercantum dalam RPJPD tahun 2025-2045 yaitu “Kabupaten Wonosobo sebagai Pusat Agrobisnis dan Pariwisata Terkemuka di Jawa Tengah yang “Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan”. Misi sebagai langkah strategis untuk mewujudkan visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Agrobisnis dan Pariwisata yang Unggul, Kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adapatif dan Berintegritas
3. Mewujudkan Infrastruktur yang Inklusif dan Berkelanjutan
4. Mewujudkan Pembangunan Sosial yang Inklusif serta Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing
5. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang Berkelanjutan.

Berdasarkan pengukuran Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2024 yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional Kabupaten Wonosobo memperoleh skor 3,59 naik dari tahun sebelumnya (Tahun 2023) dengan skor 3,21. Berikut data

skor hasil pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 dari setiap komponen dan pilar penyusunnya:



Gambar 1.1 Skor IDSD Kabupaten Wonosobo dan Skor Rata-Rata IDSD Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2024

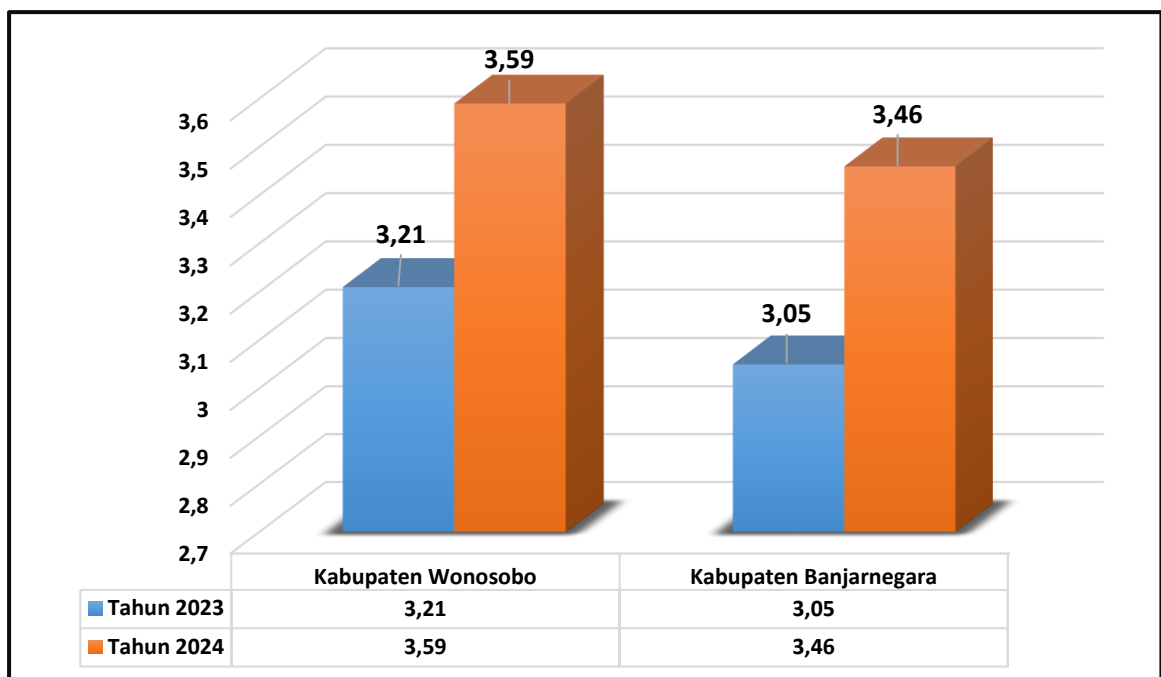
Sumber: Indeks Daya Saing Daerah, BRIN 2024 dan 2025

Skor Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Wonosobo sebesar 3,59 masih di bawah rata-rata Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dengan skor 3,77. Sedangkan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Provinsi Jawa Tengah sebesar 3,84. Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa hampir semua nilai setiap pilar Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) masih di bawah skor rata-rata Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Komponen lingkungan pendukung memiliki skor rata-rata tertinggi yaitu 3,93 dibandingkan komponen yang lain. Hal ini karena didukung oleh pilar institusi dan adopsi TIK yang memiliki nilai paling tinggi. Sedangkan komponen pasar memiliki skor rata-rata paling rendah yaitu 3,31. Hal ini dikarenakan pilar sistem keuangan memiliki nilai rendah yaitu 1,78. Pilar yang memiliki skor di atas 4 yaitu institusi, adopsi TIK, pasar produk dan ukuran pasar. Pilar yang memiliki skor di bawah 3 yaitu sistem keuangan dan kapitalisasi inovasi. Pasar produk menjadi satu-satunya pilar yang memiliki skor di atas rata-rata Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

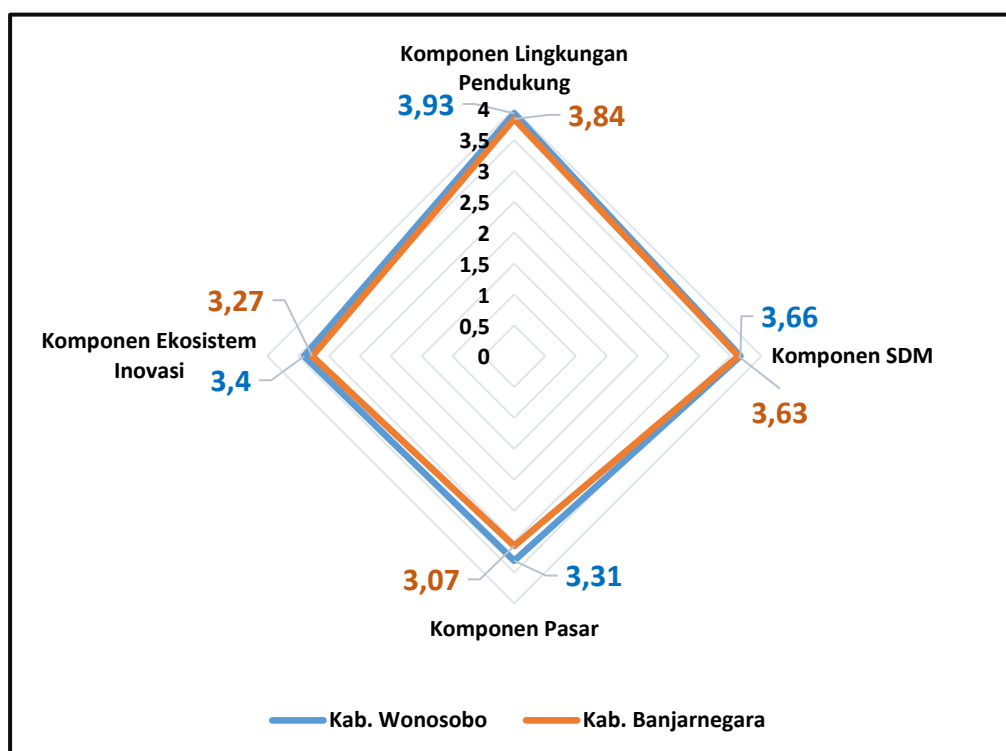
Hampir semua pilar (10) pada tahun 2024 mengalami kenaikan nilai dibandingkan tahun 2023. Hal ini menunjukkan ada peningkatan kinerja yang baik. Ada 2 pilar yang mengalami penurunan nilai yaitu pilar kesehatan (-0,07) dan sistem keuangan (0,15). Meskipun penurunan nilai tersebut tidak besar namun hal ini harus menjadi perhatian.

Kabupaten Wonosobo dalam konteks kewilayahan dan keruangan termasuk dalam bagian Wilayah Pengembangan Wonobanjar (WP Wonobanjar) yang meliputi Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara.



Gambar 1.2 Indeks Daya Saing Daerah Kawasan Wonobanjar
Sumber: Indeks Daya Saing Daerah, BRIN 2024 dan 2025 (data diolah)

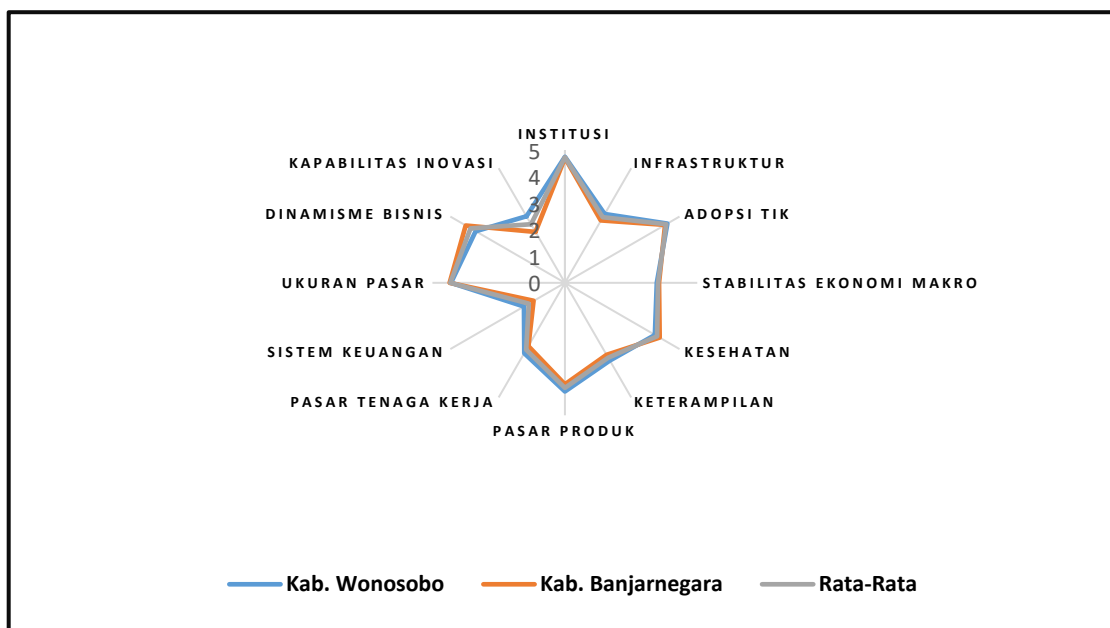
Berdasarkan data grafik di atas dapat dilihat bahwa wilayah kawasan Wonobanjar mengalami kenaikan nilai Indeks Daya Saing Daerah dari Tahun 2023 ke Tahun 2024. Kabupaten Wonosobo mengalami kenaikan sebesar 0,38 poin dan Kabupaten Banjarnegara mengalami kenaikan sebesar 0,41 poin. Kabupaten Wonosobo memiliki Indeks Daya Saing Daerah yang lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Banjarnegara. Rata-rata nilai total IDSD WP Wonobanjar sebesar 3,52 yang menempati peringkat 10 dari 10 Wilayah Pengembangan. Kabupaten Wonosobo memiliki nilai IDSD tertinggi sebesar 3,59 sedangkan Kabupaten Banjarnegara memiliki nilai terendah sebesar 3,46.



Gambar 1.3 Skor Komponen IDSD WP Wonobanjar Tahun 2024

Sumber: Indeks Daya Saing Daerah, BRIN 2025 (data diolah)

Hasil pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2024 Wilayah Pengembangan (WP) Wonobanjar menghasilkan komponen lingkungan pendukung memiliki nilai rata-rata tertinggi sebesar 3,89 sedangkan komponen pasar memiliki nilai rata-rata terendah sebesar 3,19. Kabupaten Wonosobo memiliki nilai rata-rata tertinggi pada semua komponen, komponen lingkungan pendukung (3,93), komponen sumber daya manusia (3,66), komponen ekosistem inovasi (3,39); dan komponen pasar (3,31). Komponen tertinggi di Kabupaten Banjarnegara pada komponen lingkungan pendukung sebesar 3,84. Kabupaten Banjarnegara memiliki nilai rata rata terendah pada komponen pasar (3,07). Dua komponen yang lain di Kabupaten Banjarnegara memiliki nilai sebagai berikut: komponen sumber daya manusia (3,63) dan komponen ekosistem inovasi (3,27). Gambar berikut ini juga menjelaskan tentang skor pilar IDSD pada WP Wonobanjar dari grafik jaring laba-laba tahun 2024.



Gambar 1.4 Nilai Pilar IDSD WP Wonobanjar
Sumber: Indeks Daya Saing Daerah, BRIN Tahun 2025 (data diolah)

Pilar IDSD yang paling kuat di WP Wonobanjar yaitu pilar Institusi dengan nilai rata-rata paling tinggi (4,74) dan yang kedua pilar Adopsi TIK dengan nilai rata-rata sebesar 4,42. Sedangkan pilar yang lemah yaitu pilar sistem keuangan (1,57), infrastruktur (2,86) dan pilar pasar tenaga kerja (2,91). Pilar yang paling lemah di WP Wonobanjar adalah pilar sistem keuangan, Kabupaten Wonosobo mendapatkan nilai 1,78 dan Kabupaten Banjarnegara mendapatkan nilai 1,36. Lebih lanjut akan dilihat rincian nilai masing-masing komponen terdiri dari beberapa pilar dalam penilaian skor IDSD pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1 Skor Komponen dan Pilar IDSD WP Wonobanjar Tahun 2024

Komponen/Pilar IDSD	Kab. Wonosobo	Kab. Banjarnegara	Rata-Rata
Komponen Lingkungan Pendukung	3,93	3,84	3,89
Institusi	4,76	4,72	4,74
Infrastruktur	3,01	2,72	2,86
Adopsi TIK	4,47	4,37	4,42
Stabilitas Ekonomi Makro	3,47	3,56	3,52
Komponen Sumber Daya Manusia	3,66	3,63	3,65
Kesehatan	3,93	4,13	4,03
Keterampilan	3,39	3,14	3,26
Komponen Pasar	3,31	3,07	3,19
Pasar Produk	4,10	3,83	3,96
Pasar Tenaga Kerja	3,07	2,76	2,91
Sistem Keuangan	1,78	1,36	1,57

Komponen/Pilar IDSD	Kab. Wonosobo	Kab. Banjarnegara	Rata-Rata
Ukuran Pasar	4,30	4,35	4,32
Komponen Ekosistem Inovasi	3,39	3,27	3,33
Dinamisme Bisnis	3,89	4,33	4,11
Kapabilitas Inovasi	2,90	2,22	2,56

Sumber: Indeks Daya Saing Daerah, BRIN Tahun 2025

Skor pilar (1) institusi di Wilayah Pengembangan (WP) Wonobanjar, Kabupaten Wonosobo lebih tinggi dibanding Kabupaten Banjarnegara. Secara rata-rata, dimensi dengan skor tertinggi adalah *checks and balance* (5,00) dengan semua indikator pembentuk memiliki nilai optimal (5,00) yaitu transparansi anggaran, sistem pemerintahan berbasis elektronik, kinerja instansi pemerintah, dan pelaksanaan reformasi birokrasi. Indikator terendah adalah kualitas administrasi pertanahan sebesar 3,47 di Kabupaten Banjarnegara sedangkan Kabupaten Wonosobo sebesar 3,54.

Tabel 1.2 Skor Indikator Pilar (1) Institusi WP Wonobanjar Tahun 2024

Dimensi/Indikator	Kab. Wonosobo	Kab. Banjarnegara	Rata-Rata
Dimensi Keamanan	4,88	4,86	4,87
Kejahatan Terorganisir	4,87	4,91	4,89
Tingkat Pembunuhan (<i>Rate</i>)	4,89	4,82	4,85
Dimensi Check and Balances	5,00	5,00	5,00
Transparansi Anggaran	5,00	5,00	5,00
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	5,00	5,00	5,00
Kinerja Instansi Pemerintah	5,00	5,00	5,00
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	5,00	5,00	5,00
Dimensi Transparansi	4,76	4,78	4,77
Upaya Pencegahan Korupsi	4,76	4,78	4,77
Dimensi Hak Atas Kepemilikan	4,19	4,16	4,17
Hak Atas Kepemilikan	4,83	4,84	3,84
Kualitas Administrasi Pertanahan	3,54	3,47	3,51
Dimensi Orientasi Masa Depan Pemerintah	4,74	4,41	4,58
Tingkat Pengelolaan Lingkungan	4,74	4,41	4,58

Sumber: Indeks Daya Saing Daerah, BRIN Tahun 2025

Skor pilar (2) infrastruktur di Wilayah Pengembangan (WP) Wonobanjar termasuk yang mendapat nilai rendah. Skor Kabupaten Wonosobo sebesar 3,01 dan Kabupaten Banjarnegara sebesar 2,72. Rendahnya pilar ini dikarenakan di wilayah Wonobanjar tidak ada layanan infrastruktur kereta api. Untuk layanan infrastruktur bandara dan pelabuhan masih sangat minim. Secara rata-rata, indikator dengan skor

tertinggi adalah pemenuhan standar pelayanan minimal aksesibilitas jalan dan rasio elektrifikasi seperti yang terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.3 Skor Indikator Pilar (2) Infrastruktur WP Wonobanjar Tahun 2024

Dimensi/Indikator	Kab. Wonosobo	Kab. Banjarnegara	Rata-Rata
Dimensi Infrastruktur Transportasi (Jalan Darat)	5,00	5,00	5,00
Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Aksesibilitas Jalan	5,00	5,00	5,00
Kualitas Infrastruktur Jalan	4,99	5,00	5,00
Dimensi Infrastruktur Transportasi (Jalur Kereta Api)	5,00	5,00	5,00
Layanan Infrastruktur Kereta Api	0,00	0,00	0,00
Dimensi Infrastruktur Transportasi (Udara)	0,25	0,00	0,13
Layanan Infrastruktur Bandara	0,25	0,00	0,13
Dimensi Infrastruktur Transportasi (Laut)	1,92	1,92	1,92
Layanan Infrastruktur Pelabuhan	1,92	1,92	1,92
Infrastruktur Utilitas (Kelistrikan)	5,00	5,00	5,00
Rasio Elektrifikasi	5,00	5,00	5,00
Dimensi Infrastruktur Utilitas (Air)	3,46	2,41	2,94
Akses Air Minum Layak	4,73	4,38	4,55
Tingkat Kehilangan Air	2,20	0,45	1,32

Sumber: Indeks Daya Saing Daerah, BRIN Tahun 2025

Skor pilar (3) adopsi TIK di Wilayah Pengembangan (WP) Wonobanjar adalah Kabupaten Wonosobo lebih tinggi dibanding Kabupaten Banjarnegara. Hal ini terjadi karena indikator pengguna telepon seluler dan pengguna internet di Kabupaten Wonosobo lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Banjarnegara. Secara rata-rata, indikator dengan skor tertinggi adalah jangkauan jaringan 4G. Adapun rata-rata indikator terendah adalah rasio jumlah pengguna internet.

Tabel 1.4 Skor Indikator Pilar (3) Adopsi TIK WP Wonobanjar Tahun 2024

Dimensi/Indikator	Kab. Wonosobo	Kab. Banjarnegara	Rata-Rata
Dimensi Adopsi TIK	4,47	4,37	4,42
Pengguna Telepon Seluler	4,65	4,57	4,61
Jangkauan Jaringan 4G	5,00	5,00	5,00
Pengguna Internet	3,75	3,53	3,64

Sumber: Indeks Daya Saing Daerah, BRIN Tahun 2025

Skor pilar (4) stabilitas ekonomi makro, rata-rata pilar di Wilayah Pengembangan (WP) Wonobanjar menunjukkan Kabupaten Banjarnegara lebih tinggi dibanding Kabupaten Wonosobo. Stabilitas pertumbuhan ekonomi dan indeks

ketahanan pangan mendapatkan nilai cukup tinggi. Namun dikarenakan nilai investasi dan kapasitas fiskal daerah kecil sehingga rata-rata nilai pilar hanya 3,52. Secara rata-rata, indikator dengan skor tertinggi di wilayah ini adalah stabilitas pertumbuhan ekonomi (2021-2023). Adapun rata-rata indikator terendah adalah nilai ICOR (investasi) di Kabupaten Wonosobo seperti yang terlihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 1.5 Skor Indikator Pilar (4) Stabilitas Ekonomi Makro
WP Wonobanjar Tahun 2024**

Dimensi/Indikator	Kab. Wonosobo	Kab. Banjarnegara	Rata-Rata
Dimensi Stabilitas Ekonomi Makro	3,47	3,56	3,52
Pertumbuhan Deflator PDRB	3,83	4,04	3,94
Kapasitas Fiskal Daerah	2,49	2,61	2,55
Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi (2021-2023)	4,83	4,53	4,68
Indeks Ketahanan Pangan	4,37	4,51	4,44
Nilai Investasi	1,82	2,12	1,97

Sumber: Indeks Daya Saing Daerah, BRIN Tahun 2025

Skor pilar (5) kesehatan di Wilayah Pengembangan (WP) Wonobanjar adalah Kabupaten Banjarnegara lebih tinggi dibanding Wonosobo. Nilai pilar yang cukup rendah dikarenakan rendahnya nilai angka harapan hidup di Kabupaten Wonosobo (3,93). Secara rata rata indikator Kesehatan di wilayah ini adalah 4,03 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.6 Skor Indikator Pilar (5) Kesehatan WP Wonobanjar Tahun 2024

Dimensi/Indikator	Kab. Wonosobo	Kab. Banjarnegara	Rata-Rata
Dimensi Kesehatan	3,93	4,13	4,03
Angka Harapan Hidup	3,93	4,13	4,03

Sumber: Indeks Daya Saing Daerah, BRIN Tahun 2025

Skor pilar (6) keterampilan di Wilayah Pengembangan (WP) Wonobanjar adalah Kabupaten Wonosobo lebih tinggi dibanding Kabupaten Banjarnegara. Rendahnya pilar ini dikarenakan rendahnya keterampilan lulusan di Kabupaten Banjarnegara maupun Kabupaten Wonosobo. Kemudahan menemukan pekerjaan terampil juga masih menjadi kendala di WP Wonobanjar. Secara rata-rata, indikator dengan skor tertinggi di wilayah ini adalah angka harapan sekolah. Adapun rata-rata indikator terendah adalah rendahnya keterampilan lulusan (0,95) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.7 Skor Indikator Pilar (6) Keterampilan WP Wonobanjar Tahun 2024

Dimensi/Indikator	Kab. Wonosobo	Kab. Banjarnegara	Rata-Rata
Dimensi Tenaga Kerja Saat Ini	2,75	2,21	2,48
Rata-Rata Tahun Sekolah	3,75	3,74	3,74
Keterampilan Lulusan	1,90	0,00	0,95
Kemudahan Menemukan Pekerjaan Terampil	2,61	2,88	2,75
Dimensi Tenaga Kerja Masa Depan	4,03	4,06	4,05
Angka Harapan Sekolah	4,25	4,25	4,25
Berpikir Kritis Dalam Mengajar	3,61	3,67	3,64
Rasio Murid-Guru Sekolah Dasar	4,22	4,27	4,25

Sumber: Indeks Daya Saing Daerah, BRIN Tahun 2025

Skor pilar (7) pasar produk di Wilayah Pengembangan (WP) Wonobanjar adalah Kabupaten Wonosobo lebih tinggi dibanding Kabupaten Banjarnegara. Perkembangan sektor jasa di Wilayah Pengembangan (WP) Wonobanjar kurang berkembang mengakibatkan minimnya persaingan di sektor ini yang menjadi indikator penilaian pilar pasar produk sehingga mendapatkan nilai yang tidak optimal. Secara rata-rata, indikator persaingan pasar produk yaitu sektor jasa di wilayah ini sebesar 3,96.

Tabel 1.8 Skor Indikator Pilar (7) Pasar Produk WP Wonobanjar Tahun 2024

Dimensi/Indikator	Kab. Wonosobo	Kab. Banjarnegara	Rata-Rata
Persaingan Domestik	4,10	3,83	3,96
Persaingan Sektor Jasa	4,10	3,83	3,96

Sumber: Indeks Daya Saing Daerah, BRIN Tahun 2025

Skor pilar (8) Pasar Tenaga Kerja di Wilayah Pengembangan (WP) Wonobanjar adalah Kabupaten Wonosobo lebih tinggi dibanding Kabupaten Banjarnegara. Pilar ini mendapatkan nilai di bawah 3, hal ini dikarenakan lemahnya kebijakan pasar tenaga kerja aktif. Secara rata-rata, indikator dengan skor tertinggi di wilayah ini adalah kesetaraan upah perempuan dan laki-laki. Adapun rata-rata indikator terendah adalah kebijakan pasar tenaga kerja aktif. Indikator upah pekerja di Kabupaten Banjarnegara lebih tinggi dibandingkan di Kabupaten Wonosobo.

Tabel 1.9 Skor Indikator Pilar (8) Pasar Tenaga Kerja WP Wonobanjar Tahun 2024

Dimensi/Indikator	Kab. Wonosobo	Kab. Banjarnegara	Rata-Rata
Dimensi Fleksibilitas	2,66	2,58	2,62
Kebijakan Pasar Tenaga Kerja Aktif	2,25	1,73	1,99
Upah Pekerja	3,07	3,42	3,24

Dimensi/Indikator	Kab. Wonosobo	Kab. Banjarnegara	Rata-Rata
Dimensi Meritokrasi dan Insentif	3,88	3,12	3,50
Kesetaraan Upah Perempuan dan Laki-Laki	3,88	3,12	3,50

Sumber: Indeks Daya Saing Daerah, BRIN Tahun 2025

Skor pilar (9) sistem keuangan di Wilayah Pengembangan (WP) Wonobanjar adalah Kabupaten Wonosobo lebih tinggi dibanding Kabupaten Banjarnegara. Pilar sistem keuangan adalah pilar dengan nilai paling rendah. Rendahnya pilar ini dikarenakan rendahnya persentase premi asuransi jiwa dan non-jiwa terhadap PDRB ADHB dan nilai akad kredit usaha rakyat yang juga rendah. Secara rata-rata, indikator dengan skor tertinggi di wilayah ini adalah kredit swasta terhadap PDRB harga berlaku. Adapun rata-rata indikator terendah adalah persentase premi asuransi jiwa dan non-jiwa terhadap PDRB ADHB.

**Tabel 1.10 Skor Indikator Pilar (9) Sistem Keuangan
WP Wonobanjar Tahun 2024**

Dimensi/Indikator	Kab. Wonosobo	Kab. Banjarnegara	Rata-Rata
Dimensi Kedalaman	1,78	1,36	1,57
Kredit Swasta Terhadap PDRB Harga Berlaku	3,14	2,74	2,94
Nilai Akad Kredit Usaha Rakyat (Rupiah)	1,28	1,04	1,16
Persentase Premi Asuransi Jiwa dan Nonjiwa Terhadap PDRB ADHB	0,92	0,31	0,61

Sumber: Indeks Daya Saing Daerah, BRIN Tahun 2025

Skor pilar (10) ukuran pasar di Wilayah Pengembangan (WP) Wonobanjar adalah Kabupaten Banjarnegara lebih tinggi dibanding Kabupaten Wonosobo. Secara rata-rata, indikator PDRB ADHK di wilayah ini sebesar 4,32.

**Tabel 1.11 Skor Indikator Pilar (10) Ukuran Pasar
WP Wonobanjar Tahun 2024**

Dimensi/Indikator	Kab. Wonosobo	Kab. Banjarnegara	Rata-Rata
Dimensi Ukuran Pasar	4,30	4,35	4,32
PDRB ADHK 2010 (Miliar Rupiah)	4,30	4,35	4,32

Sumber: Indeks Daya Saing Daerah, BRIN Tahun 2025

Skor pilar (11) dinamisme bisnis di Wilayah Pengembangan (WP) Wonobanjar adalah Kabupaten Banjarnegara lebih tinggi dibanding Kabupaten Wonosobo. Nilai dua indikator dinamisme bisnis yaitu pertumbuhan NIB dan kinerja pelayanan publik di Kabupaten Banjarnegara lebih tinggi dibanding Kabupaten Wonosobo. Secara rata-

rata, indikator dengan skor tertinggi di wilayah ini adalah kinerja pelayanan publik. Adapun rata-rata indikator terendah adalah pertumbuhan NIB.

**Tabel 1.12 Skor Indikator Pilar (11) Dinamisme Bisnis
WP Wonobanjar Tahun 2024**

Dimensi/Indikator	Kab. Wonosobo	Kab. Banjarnegara	Rata-Rata
Dimensi Persyaratan Administrasi	3,89	4,33	4,11
Pertumbuhan Nomor Induk Berusaha	3,59	4,29	3,94
Kinerja Pelayanan Publik	4,19	4,36	4,27

Sumber: Indeks Daya Saing Daerah, BRIN Tahun 2025

Skor pilar (12) Kapabilitas Inovasi di Wilayah Pengembangan (WP) Wonobanjar adalah Kabupaten Wonosobo lebih tinggi dibanding Kabupaten Banjarnegara. Dimensi riset mendapatkan nilai paling rendah dikarenakan rendahnya belanja riset dan indeks keunggulan lembaga riset (perguruan tinggi) serta minimnya publikasi ilmiah. Secara rata-rata, indikator dengan skor tertinggi di wilayah ini adalah pengembangan kluster. Adapun rata-rata indikator terendah adalah indeks keunggulan lembaga riset.

**Tabel 1.13 Skor Indikator Pilar (12) Kapabilitas Inovasi
WP Wonobanjar Tahun 2024**

Dimensi/Indikator	Kab. Wonosobo	Kab. Banjarnegara	Rata-Rata
Dimensi Keanekaragaman dan Kolaborasi	4,39	4,21	4,30
Keanekaragaman Tenaga Kerja	3,78	3,59	3,69
Pengembangan Kluster	5,00	4,83	4,91
Dimensi Riset	1,91	0,89	1,40
Publikasi Ilmiah	2,84	1,78	2,31
Aplikasi Kekayaan Intelektual (KI)	3,62	1,55	2,58
Belanja Riset	0,76	0,10	0,43
Indeks Keunggulan Lembaga Riset	0,41	0,13	0,27
Dimensi Komersialisasi	3,93	3,55	3,74
Aplikasi Merk Dagang	3,93	3,55	3,74

Sumber: Indeks Daya Saing Daerah, BRIN Tahun 2025

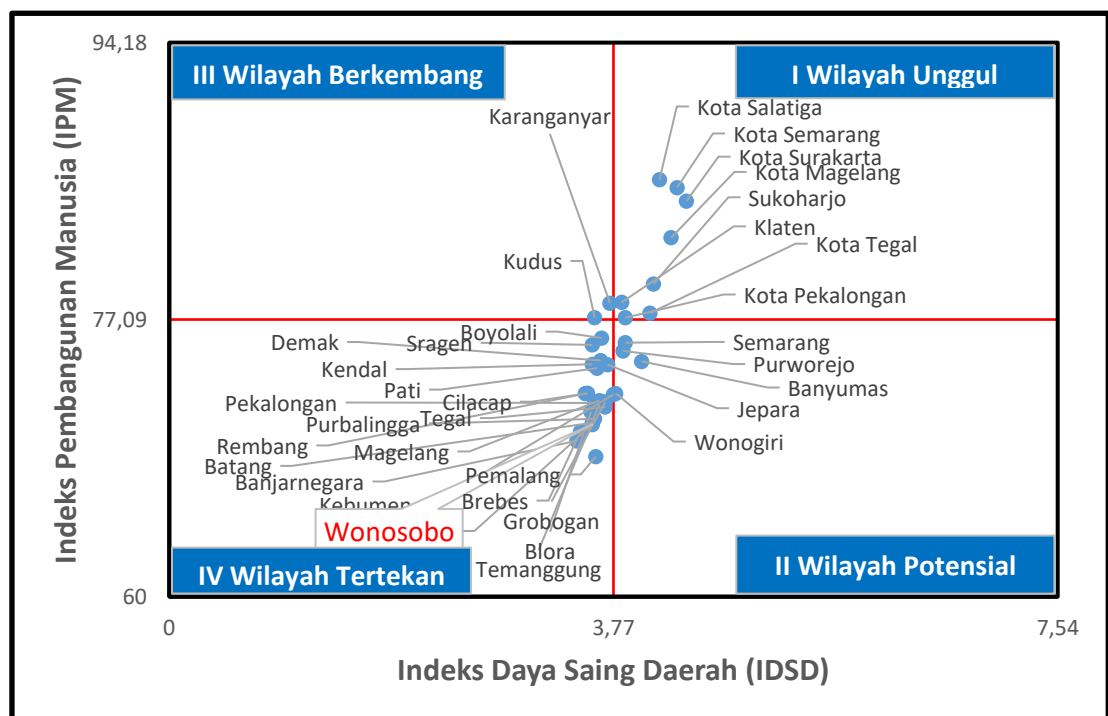
Capaian pilar IDSD Kabupaten Wonosobo memiliki empat pilar yang nilainya lebih kecil dibandingkan dengan Kabupaten Banjarnegara dalam satu Wilayah Pengembangan (WP) Wonobanjar yaitu stabilitas ekonomi makro, kesehatan ukuran pasar dan dinamisme bisnis. Pilar IDSD Kabupaten Wonosobo yang perlu menjadi perhatian dengan nilai di bawah tiga adalah sistem keuangan dan kapabilitas inovasi.

B. Profil Konstelasi Nilai Wilayah Indeks Daya Saing Daerah dan Indikator Makro

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dianalisis keterkaitannya dengan Indikator Makro Pembangunan yang meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan PDRB, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) serta Kemiskinan. Dengan menggunakan metode tipologi Klassen maka dihasilkan pengelompokan wilayah dengan 4 kategori/tipologi, yaitu unggul, berkembang, potensial dan tertekan. Hasil analisis Indeks Daya Saing Daerah dalam Indikator Makro Pembangunan di Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut.

1) Indeks Daya Saing Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki hubungan yang erat karena keduanya mencerminkan kualitas pembangunan suatu wilayah dalam aspek ekonomi, sosial dan sumber daya manusia. Konstelasi kedua indikator tersebut dapat dilihat dari sejumlah perspektif, di antaranya kesehatan, pendidikan, keterampilan.



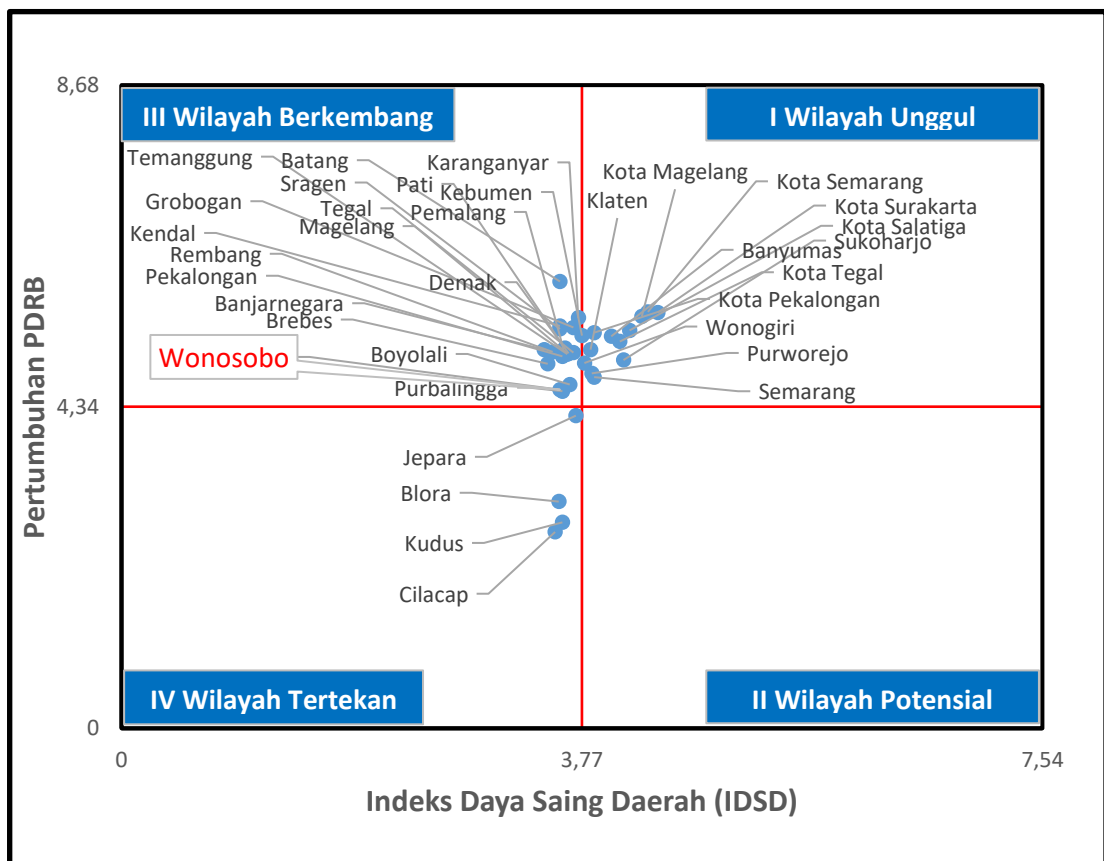
Gambar 1.5 Kuadran Nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Berdasarkan hasil analisis Indeks Daya Saing Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia, Kabupaten Wonosobo berada pada Kategori IV atau Wilayah Tertekan. Daerah yang masuk dalam Kategori IV atau Wilayah Tertekan mengindikasikan daerah dengan capaian nilai Indeks Daya Saing Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia di bawah rata-rata provinsi. Dilihat berdasarkan komponen sumber daya manusia, khususnya pada pilar kesehatan dan keterampilan, menunjukkan bahwa capaian IDSD Kabupaten Wonosobo pada kedua pilar tersebut memiliki hasil yang baik dengan skor >3 bahkan pilar kesehatan hampir 4 (3,93). Namun demikian, jika dilihat lebih rinci berdasarkan dimensi, Kabupaten Wonosobo memiliki capaian lemah pada dimensi tenaga kerja saat ini yang diukur menggunakan indikator rata-rata lama sekolah, keterampilan lulusan, serta kemudahan menemukan pekerja terampil. Menurut data BPS Kabupaten Wonosobo tahun 2025, angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2024 sebesar 6,9 menunjukkan bahwa rata-rata penduduk usia 15 tahun ke atas telah menempuh pendidikan sampai dengan setara kelas 1 SMP. Sementara itu, data BPS juga menunjukkan penduduk dengan status bekerja di Kabupaten Wonosobo menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan didominasi oleh penduduk lulusan Sekolah Dasar. Kondisi tersebut menggambarkan kualitas sumber daya manusia dan tenaga kerja di Kabupaten Wonosobo masih membutuhkan peningkatan agar lebih berdaya saing.

2) Indeks Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan PDRB

Konstelasi antara Indeks Daya Saing Daerah dengan pertumbuhan PDRB Kabupaten Wonosobo mencerminkan hubungan yang mempengaruhi karena karena pertumbuhan ekonomi mencerminkan produktivitas sektor-sektor utama. Kontribusi sektor pada perekonomian daerah Kabupaten Wonosobo berasal dari sektor industri pengolahan, pertanian serta perdagangan.



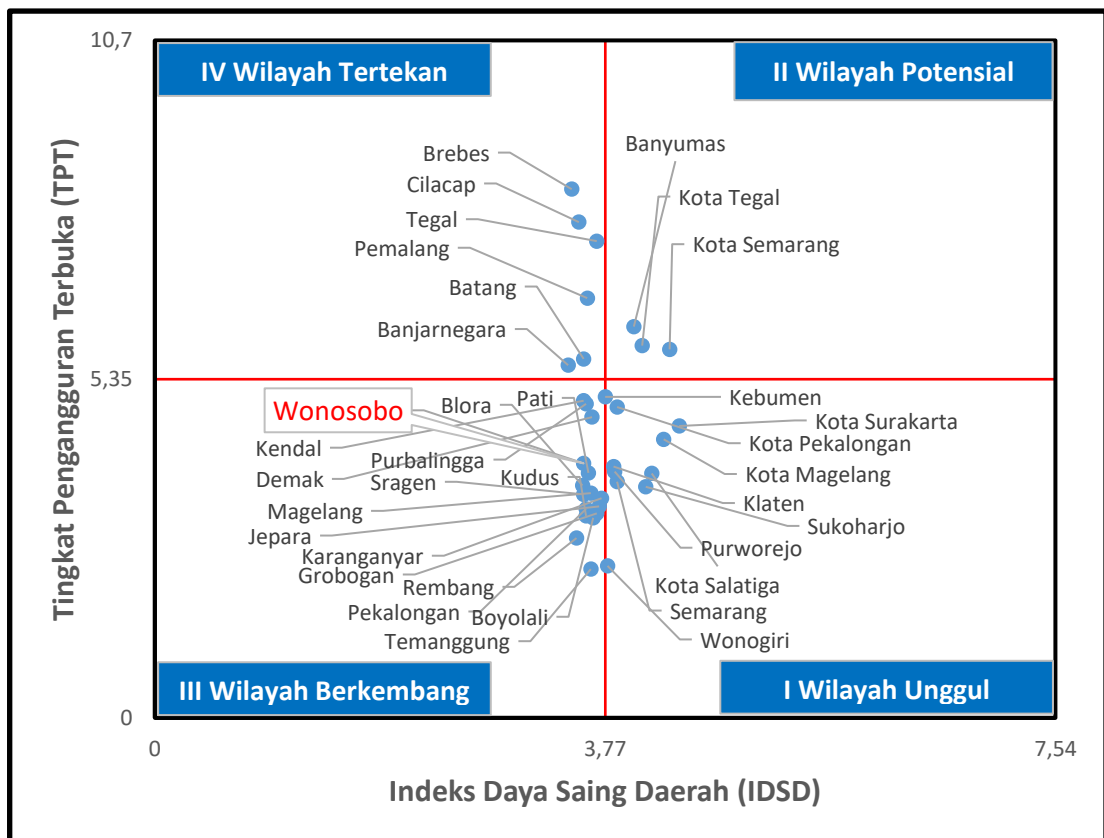
Gambar 1.6 Kuadran Nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dan Pertumbuhan PDRB

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Dari hasil analisis Indeks Daya Saing Daerah dengan pertumbuhan PDRB, Kabupaten Wonosobo masuk dalam daerah Kategori III atau Wilayah Berkembang dengan nilai Indeks Daya Saing Daerah (3,59) di bawah rata-rata provinsi (3,76) dan nilai pertumbuhan PDRB (4,57) juga di bawah rata-rata kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah (4,77). Posisi Kabupaten Wonosobo yang berada pada kategori Wilayah Berkembang menunjukkan potensi daerah cukup besar namun belum sepenuhnya dioptimalkan untuk meningkatkan daya saing daerah.

3) Indeks Daya Saing Daerah dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Indeks Daya Saing Daerah dan Tingkat Pengangguran Terbuka memiliki hubungan yang saling memengaruhi. Komponen daya saing daerah seperti stabilitas ekonomi makro, pendidikan, keterampilan dan pasar tenaga kerja merupakan pilar yang menggambarkan kapasitas daerah dalam menciptakan lapangan kerja.

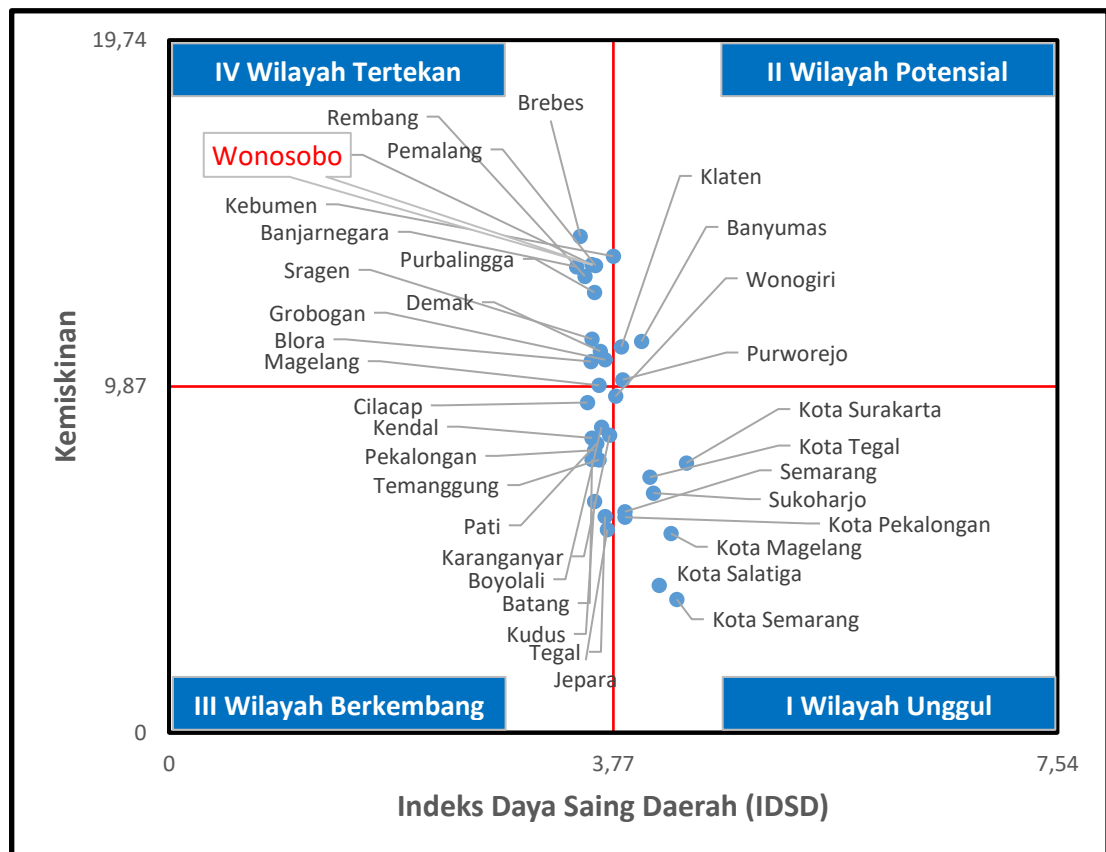


Gambar 1.7 Kuadran Nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Sumber: Hasil Analisis, 2025

Dari hasil analisis Indeks Daya Saing Daerah dengan pertumbuhan Tingkat Pengangguran Terbuka, Kabupaten Wonosobo masuk dalam daerah Kategori III atau Wilayah Berkembang dengan nilai Indeks Daya Saing Daerah (3,59) di bawah rata-rata provinsi (3,76). Nilai TPT Kabupaten Wonosobo (4,02) lebih kecil dibandingkan rata-rata kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah (4,52). Posisi Kabupaten Wonosobo yang berada pada kategori Wilayah Berkembang menunjukkan bahwa meskipun penyerapan tenaga kerja yang cukup tinggi namun kapasitas daerah dalam menarik investasi atau menciptakan peluang kerja di sektor-sektor yang lebih produktif masih belum optimal. Peningkatan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia perlu didorong untuk membantu meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor unggulan maupun potensial.

4) Indeks Daya Saing Daerah dan Kemiskinan

Indeks Daya Saing Daerah dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo memiliki keterkaitan yang saling memengaruhi. Tingkat daya saing daerah menggambarkan kemampuan daerah dalam menciptakan ekonomi yang lebih inklusif dan peluang kerja yang lebih baik yang berkorelasi langsung dengan tingkat kemiskinan di daerah.



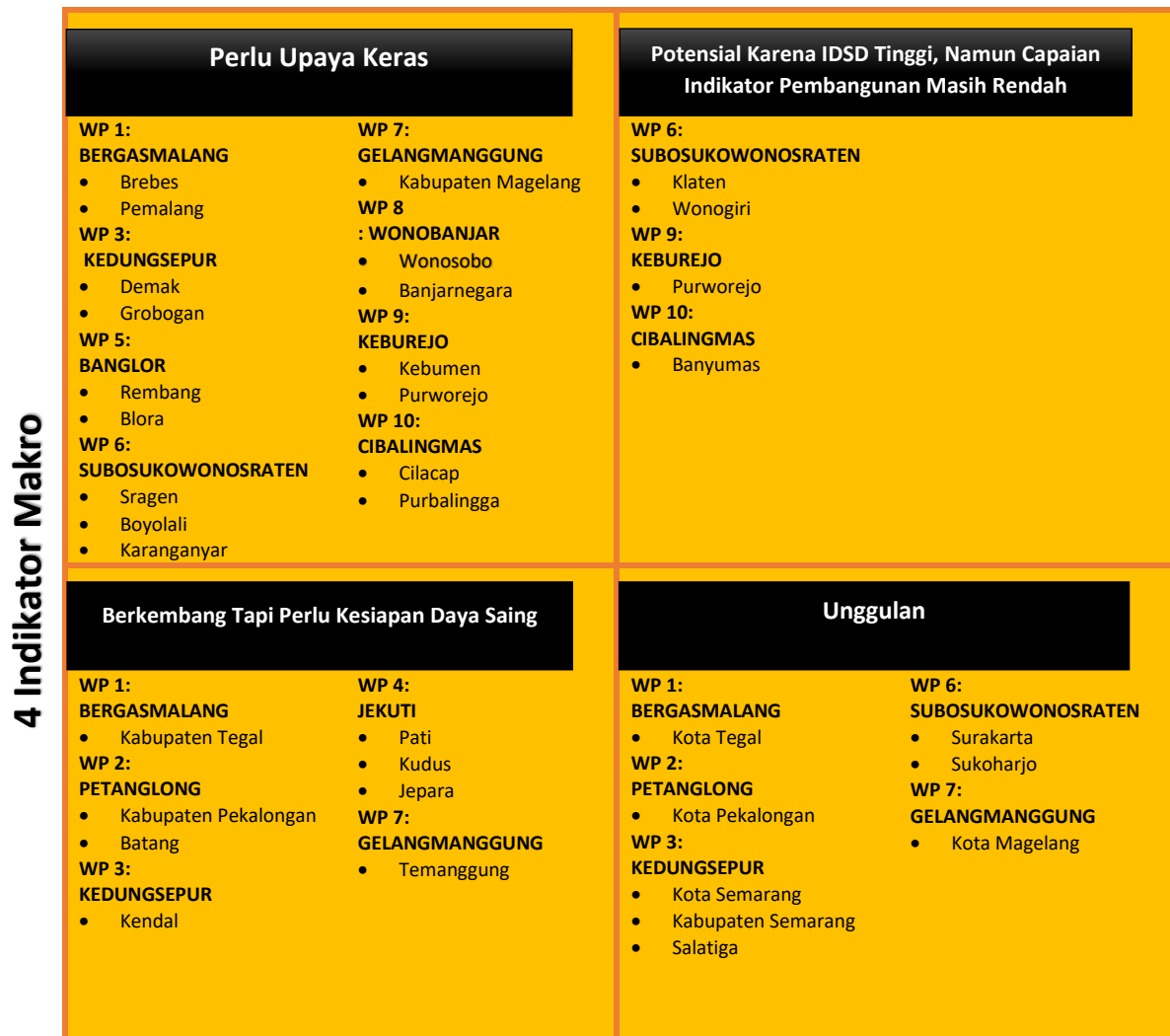
Gambar 1.8 Kuadran Nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dan Kemiskinan

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Dari hasil analisis Indeks Daya Saing Daerah dengan kemiskinan, Kabupaten Wonosobo masuk dalam daerah kuadran IV Wilayah Tertekan dengan nilai Indeks Daya Saing Daerah (3,59) di bawah rata-rata kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah (3,76). Nilai kemiskinan Kabupaten Wonosobo (13,34) di atas rata-rata kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah (9,12). Kabupaten Wonosobo yang termasuk dalam kategori Wilayah Tertekan menunjukkan bahwa kondisi kesejahteraan masyarakat belum baik. Maka kemiskinan ini harus menjadi

prioritas dalam pembangunan daerah dengan memperkuat daya saing daerah dan sektor ekonomi produktif secara merata.

Berdasarkan hasil analisis Indeks Daya Saing Daerah dalam Indikator Makro Pembangunan dapat digambarkan sebagai berikut:



IDSD

Gambar 1.9 Kuadran Nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dan Capaian Indikator Makro

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Kabupaten Wonosobo sesuai kuadran di atas masuk ke dalam kategori daerah yang “Perlu Upaya Keras” begitu juga Kabupaten Banjarnegara yang tergabung dalam satu wilayah pengembangan Wonobanjar. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Wonosobo telah mengalami pemulihan pasca pandemi Covid-19, namun belum sepenuhnya pulih seperti sebelum pandemi. Pasca pandemi Covid-19 pertumbuhan ekonomi Kabupaten

Wonosobo belum stabil. Tahun 2022 pertumbuhan ekonomi mencapai 5,02 namun tahun berikutnya 2023 turun menjadi 4,3. Tahun 2024 sedikit mengalami kenaikan menjadi 4,57. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga menjadi salah satu permasalahan yang cukup krusial di Kabupaten Wonosobo. Rata-rata lama sekolah yang masih di angka 6,9 menjadi tantangan untuk segera dijawab dengan program dan kebijakan. Tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan dari tahun ke tahun mengalami tren penurunan yang cukup positif. Peningkatan daya saing sumber daya manusia menjadi salah satu kunci untuk terus mengurangi tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan.

C. Interaksi Sistem Perekonomian dan Pelayanan Umum Perwilayahan

1) Interaksi Sistem Ekonomi Perwilayahan

a. Analisis Profil Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Wonosobo Tahun 2022-2024 (miliar rupiah) adalah sebagai berikut:

Tabel 1.14 PDRB Kabupaten Wonosobo Tahun 2024

No.	Sektor PDRB	PDRB	Kontribusi	Pertumbuhan Laju
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Rp. 7.333,57	35,2%	9,3%
2.	Industri Pengolahan	Rp. 4.435,83	21,3%	4,8%
3.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Rp. 4.094,91	19,6%	5,4%
4.	Konstruksi	Rp. 1.766,03	8,5%	7%
5.	Jasa Pendidikan	Rp. 1.574,42	7,6%	10,1%
6.	Transportasi dan Pergudangan	Rp. 1.570,24	7,5%	6,1%
7.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Rp. 845,14	4,1%	10%
8.	Jasa Keuangan dan Asuransi	Rp. 777,69	3,7%	4,6%
9.	Jasa Lainnya	Rp. 606,96	2,9%	10,5%
10.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Rp. 554,22	2,7%	9,4%
11.	Informasi dan Komunikasi	Rp. 389,27	1,9%	7,7%

No.	Sektor PDRB	PDRB	Kontribusi	Laju Pertumbuhan
12.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Rp. 384,4	1,8%	8,7%
13.	Real Estat	Rp. 357,19	1,7%	6,3%
14.	Pertambangan dan Penggalian	Rp. 240,24	1,2%	3,8%
15.	Jasa Perusahaan	Rp. 65,91	0,3%	5,6%
16.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Rp. 24,32	0,1%	4%
17.	Pengadaan Listrik dan Gas	Rp. 7,84	0%	7,1%

Sumber: Kabupaten Wonosobo Dalam Angka 2025

Kontribusi terbesar dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Wonosobo adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang mencapai 35,2%. Industri pengolahan berada di urutan selanjutnya dengan kontribusi sebesar 21,3%.

b. Interaksi Ekonomi Dengan Daerah Lain

Kabupaten Wonosobo menjalankan interaksi ekonomi dengan daerah-daerah sekitarnya di Provinsi Jawa Tengah. Gambaran interaksi ekonomi Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten Wonosobo sebagai daerah penghasil sayuran memiliki interaksi ekonomi dengan beberapa daerah sebagai tujuan pemasaran antara lain yaitu Kota Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purwokerto, Kota Semarang, Kota Salatiga dan Kabupaten Grobogan.
2. Kabupaten Wonosobo sebagai daerah penghasil ketela pohon memiliki interaksi ekonomi dengan Kota Salatiga sebagai penyedia bahan baku pada industri pengolahan.
3. Kabupaten Wonosobo sebagai penyedia tenaga kerja memiliki interaksi ekonomi dengan daerah-daerah pusat industri antara lain yaitu Kabupaten Temanggung, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Semarang dan Kota Semarang.

4. Kabupaten Wonosobo memiliki komoditas ekspor seperti kayu olahan, teh hitam, nata de coco, benih sayur dan buah, benih bunga, bunga pakis memiliki interaksi ekonomi dengan Kota Semarang sebagai penyedia fasilitas distribusi dengan adanya Pelabuhan Tanjung Emas.

Sektor PDRB dengan komoditas tertinggi di Kabupaten Wonosobo adalah 1) sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; 2) sektor industri pengolahan. Pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan Kabupaten Wonosobo memiliki beberapa produk unggulan seperti kopi, ketela pohon, padi, kentang, carica dan biofarmaka. Pada sektor industri pengolahan yang menjadi komoditas antara lain kayu lapis, teh hitam, dan manisan carica.

Selain dua sektor tertinggi berdasarkan PDRB diatas Kabupaten Wonosobo juga memiliki potensi cukup besar dalam kontribusi perekonomian daerah yaitu sektor pariwisata. Kawasan Dieng menjadi unggulan dalam sektor pariwisata ini dengan adanya berbagai macam tujuan wisata seperti Kawah Sidikang, Telaga Menjer dan lain sebagainya. Kabupaten Wonosobo juga terdapat beberapa gunung yang menjadi favorit bagi para pendaki seperti gunung prau, gunung kembang, gunung bismo, gunung sumbing dan gunung sindoro. Kabupaten Wonosobo juga memiliki produk khas yaitu manisan carica dan purwaceng yang bisa menjadi oleh-oleh bagi para wisatawan.

2) Interaksi Pelayanan Umum Perwilayahan

a. Analisis Profil Pelayanan Umum

1. Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro Kabupaten Wonosobo merupakan rumah sakit dengan tipe B.
2. Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ), perguruan tinggi berbasis Agama Islam yang menjadi rujukan di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
3. STIKES Muhammadiyah Wonosobo, perguruan tinggi yang menyiapkan tenaga dan ahli di bidang kesehatan.
4. *Geopark* Nasional Dieng menjadi salah satu tujuan wisata edukasi utama di Provinsi Jawa Tengah.

b. Interaksi Pelayanan Umum Daerah Lain Ke Kabupaten Wonosobo

1. Kabupaten Temanggung
 - a) Infrastruktur wilayah, pembangunan infrastruktur jalan sebagai jalur penghubung antar kabupaten/kota
 - b) Perdagangan, media promosi hasil produksi UMKM
 - c) Pertanian, Balai Pelatihan Pertanian Jawa Tengah berada di Kabupaten Temanggung.
2. Kota Magelang
 - a) Kesehatan, sarana rujukan.
 - b) Pendidikan dan kerjasama penelitian dengan akademisi. Kota Magelang memiliki perguruan tinggi negeri yaitu Universitas Tidar Magelang dan perguruan tinggi swasta yaitu Universitas Muhammadiyah Magelang.
 - c) Infrastruktur wilayah, pembangunan infrastruktur jalan sebagai jalur penghubung antar kabupaten/kota
 - d) Perdagangan, media promosi hasil produksi UMKM
3. Kabupaten Magelang
 - a) Infrastruktur wilayah, pembangunan infrastruktur jalan sebagai jalur penghubung antar kabupaten/kota
 - b) Perdagangan, media promosi hasil produksi UMKM
4. Kabupaten Kebumen
 - a) Kawasan Konservasi Ilmiah (KKI) Karangsambung BRIN di Kebumen adalah laboratorium alam geologi utama di Jawa Tengah yang dikelola BRIN.
 - b) Infrastruktur wilayah, pembangunan infrastruktur jalan sebagai jalur penghubung antar kabupaten/kota
 - c) Perdagangan, media promosi hasil produksi UMKM
5. Kabupaten Purworejo
 - a) Infrastruktur wilayah, pembangunan infrastruktur jalan sebagai jalur penghubung antar kabupaten/kota
 - b) Perdagangan, media promosi hasil produksi UMKM

6. Kabupaten Banjarnegara
 - a) Infrastruktur wilayah, pembangunan infrastruktur jalan sebagai jalur penghubung antar kabupaten/kota
 - b) Perdagangan, media promosi hasil produksi UMKM
7. Kabupaten Purbalingga
 - a) Infrastruktur wilayah, pembangunan infrastruktur jalan sebagai jalur penghubung antar kabupaten/kota
 - b) Perdagangan, media promosi hasil produksi UMKM
8. Kabupaten Banyumas
 - a) Pendidikan dan kerjasama penelitian dengan akademisi. Di Kabupaten Banyumas terdapat dua perguruan tinggi negeri yaitu Universitas Jenderal Soedirman dan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri. Perguruan tinggi swasta di Kabupaten Banyumas juga ada diantaranya yaitu Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Purwokerto, Institut Teknologi Telkom (ITT) Purwokerto dan sebagainya.
 - b) Infrastruktur wilayah, pembangunan infrastruktur jalan sebagai jalur penghubung antar kabupaten/kota
 - c) Perdagangan, media promosi hasil produksi UMKM
9. Kota Salatiga
 - a) Kesehatan, sarana rujukan Rumah Sakit Paru Dr. Ario Wirawan.
 - b) Pendidikan dan kerjasama penelitian dengan akademisi. Di kota Salatiga terdapat perguruan tinggi UIN Salatiga dan Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW).
 - c) Infrastruktur wilayah, pembangunan infrastruktur jalan sebagai jalur penghubung antar kabupaten/kota
 - d) Perdagangan, media promosi hasil produksi UMKM
10. Kabupaten Semarang
 - a) Infrastruktur wilayah, pembangunan infrastruktur jalan sebagai jalur penghubung antar kabupaten/kota
 - b) Perdagangan, media promosi hasil produksi UMKM

11. Kota Semarang

- a) Kesehatan, sarana rujukan Rumah Sakit tipe A yaitu Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Kariadi.
- b) Pendidikan dan kerjasama penelitian dengan akademisi. Di Kota Semarang terdapat empat perguruan tinggi negeri yaitu Universitas Diponegoro (UNDIP), Universitas Negeri Semarang (UNNES), UIN Walisongo dan Politeknik Negeri Semarang (POLINES). Ada banyak perguruan tinggi swasta di Kota Semarang diantaranya Universitas Semarang (USM), Universitas Sultan Agung (UNISSULA), Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS), Universitas Muhammadiyah Semarang (UNIMUS), Universitas PGRI Semarang dan sebagainya.
- c) Infrastruktur wilayah, pembangunan infrastruktur jalan sebagai jalur penghubung antar kabupaten/kota
- d) Perdagangan, media promosi hasil produksi UMKM
- e) Transportasi, adanya Pelabuhan Tanjung Emas sebagai pintu transportasi laut untuk barang dan orang dan Bandara Ahmad Yani sebagai bandara Internasional.

12. Kota Surakarta

- a) Kesehatan, sarana rujukan Rumah Sakit tipe A yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Moewardi dan Rumah Sakit Khusus Ortopedi milik Kementerian Kesehatan.
- b) Pendidikan dan kerjasama penelitian dengan akademisi. Di kota Surakarta terdapat tiga perguruan tinggi negeri yaitu Universitas Sebelas Maret (UNS), Institut Seni Indonesia (ISI) dan UIN Raden Mas Said. Beberapa perguruan tinggi swasta yang ada di Kota Surakarta yaitu Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Universitas Duta Bangsa (UDB), Universitas Slamet Riyadi (UNISRI), Universitas Sahid Surakarta, Universitas Surakarta (UNSA) dan sebagainya.
- c) Infrastruktur wilayah, pembangunan infrastruktur jalan sebagai jalur penghubung antar kabupaten/kota
- d) Perdagangan, media promosi hasil produksi UMKM
- e) Transportasi, Bandara Adi Soemarmo sebagai bandara Internasional

13. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

- a) Kesehatan, sarana rujukan Rumah Sakit tipe A yaitu Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Sardjito.
- b) Pendidikan dan kerjasama penelitian dengan akademisi. Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terdapat empat perguruan tinggi negeri yaitu Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), UIN Sunan Kalijaga dan Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Beberapa perguruan tinggi swasta yang ada di Provinsi DIY antara lain Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Universitas Sanata Dharma (USD), Universitas Teknologi Yogyakarta (UTY), Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Yogyakarta dan lainnya.
- c) Perdagangan, media promosi hasil produksi UMKM
- d) Transportasi, Bandara *Yogyakarta International Airport* (YIA) sebagai bandara internasional.

BAB II

ANALISIS PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

A. Kebijakan Perencanaan Pembangunan dan Program Strategis

Kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo saat ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045, pembangunan Kabupaten Wonosobo memiliki Visi yaitu “Kabupaten Wonosobo sebagai Pusat Agrobisnis dan Pariwisata Terkemuka di Jawa Tengah yang Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan” pada Tahun 2045. Untuk mencapai visi tersebut, terdapat 3 (tiga) sasaran utama visi sebagai berikut:

1. Pusat Agrobisnis dan Pariwisata Terkemuka yang Berdaya Saing.

Menjadi pusat agrobisnis & pariwisata terkemuka di Jawa Tengah sekaligus merupakan strategi Kabupaten Wonosobo untuk menggerakkan sektor-sektor lainnya. Indikator dalam sasaran visi ini terdiri dari Indeks Daya Saing Daerah (IDSD).

2. Peningkatan Kesejahteraan

Peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Wonosobo ditandai dengan meningkatnya PDRB serta menurunnya angka kemiskinan dan menurunnya ketimpangan. Indikator yang digunakan untuk mengevaluasi capaian sasaran visi ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Gini (Rasio Gini).

3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan

Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan ditujukan untuk memastikan terjaganya keseimbangan antara pembangunan ekonomi dengan kelestarian lingkungan sehingga keberlanjutan pembangunan dapat terus terjaga. Pencapaian sasaran ini ditandai Indeks Pembangunan Berkelanjutan.

Permasalahan Kabupaten Wonosobo berdasarkan aspek daya saing daerah adalah sebagai berikut:

a. Daya Saing Ekonomi Daerah Belum Optimal

Berdasarkan pilar-pilar pembentuk daya saing ekonomi daerah tampak bahwa secara umum ukuran pasar yang besar dan keterbukaan pasar produk menjadi keunggulan dari daya saing ekonomi Kabupaten Wonosobo. Ukuran pasar yang besar didominasi oleh sektor industri pengolahan, sektor pertanian dan sektor perdagangan sebagai sektor unggulan. Meskipun demikian sektor sektor unggulan tersebut masih memiliki tantangan dalam pengembangannya antara lain:

1. Permasalahan di sektor pertanian antara lain masih minimnya pemanfaatan teknologi dan inovasi serta penggunaan alat-alat pertanian modern dalam proses produksi, masih tingginya biaya produksi pertanian, minimnya kapasitas dan kompetensi petani, masih lambannya regenerasi petani, serta adanya alih fungsi lahan pertanian.
2. Permasalahan di sektor industri pengolahan antara lain rendahnya nilai tambah produk dan kapasitas produksi terutama dari industri kecil dan menengah (UKM), akses pasar yang masih terbatas, lemahnya kapasitas dan kompetensi pelaku usaha kecil dan menengah, masih minimnya kemitraan usaha, masih minimnya digitalisasi, serta masih perlunya pembiayaan/ modal terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah.
3. Permasalahan di sektor perdagangan yaitu belum optimalnya ekspor produk unggulan daerah ekspor produk unggulan daerah sehingga masih diperlukan intervensi kebijakan dalam pengendalian harga dan sistem distribusi perdagangan
4. Permasalahan di sektor pariwisata antara lain masih rendahnya kontribusi pendapatan sektor pariwisata yaitu hanya menyumbang 5,98%, masih belum maksimalnya pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, masih minimnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, masih rendahnya lama tinggal wisatawan yaitu 1,06 hari.
5. Permasalahan pangan antara lain produksi pangan seperti padi, jagung, ubi kayu, dan ubi jalar mengalami penurunan mulai tahun 2019, dari 423.288 ton menjadi 234.352 ton pada tahun 2023; masih kurangnya pemenuhan kebutuhan pangan yang bergizi, beragam, seimbang, dan aman; masih

minimnya diversifikasi dan pengolahan lanjutan produk pangan lokal; masih panjangnya rantai distribusi produk pangan; masih terbatasnya jaminan kualitas produk pangan; belum adanya penelitian tentang pangan dan masih rendahnya inovasi teknologi pangan; serta minimnya partisipasi masyarakat dalam penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan.

b. Daya Saing Sumber Daya Manusia yang Belum Optimal

Sumber daya manusia merupakan aspek penting dalam daya saing daerah, terutama karena manusia sebagai pelaku pembangunan di daerah. Pembangunan SDM terutama dilakukan dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat untuk menghasilkan manusia yang sehat, cerdas, kreatif, terampil dan unggul. Dalam konteks Indeks Daya Saing Daerah, daya saing SDM dapat dilihat dari dua aspek yaitu kesehatan dan keterampilan.

1. Pembangunan kesehatan yang tercermin dalam angka harapan hidup Kabupaten Wonosobo sudah cukup tinggi yaitu di angka 74,01 yang didukung dengan rendahnya angka kematian ibu dan bayi menjadi faktor penopang daya saing SDM di Kabupaten Wonosobo. Namun meskipun dalam kategori tinggi, angka harapan hidup di Kabupaten Wonosobo masih di bawah angka provinsi dan nasional.
2. Dari aspek keterampilan, Kabupaten Wonosobo masih memiliki tantangan yang besar terutama terhadap kualitas tenaga kerja yang siap memasuki pasar tenaga kerja. Masih rendahnya rata-rata lama sekolah, rendahnya tingkat keterampilan lulusan serta sulitnya menemukan pekerja terampil akan menjadi permasalahan daya saing sumber daya manusia Kabupaten Wonosobo. Masih perlu dilakukan peningkatan kualitas pendidikan, memastikan semua anak usia sekolah untuk bersekolah, memberikan kemudahan akses layanan pendidikan serta meningkatkan mutu pendidikan agar mampu menjawab kebutuhan pasar kerja dengan peningkatan kecakapan hidup, *soft skill*, kompetensi dan kemampuan keterampilan bagi tenaga kerja.

c. Daya Saing Infrastruktur yang Masih Rendah

Ketersediaan infrastruktur menjadi pendukung penting dalam aktivitas perekonomian dan peningkatan produktivitas daerah, terutama terkait aspek

distribusi barang dan jasa. Masalah daya saing infrastruktur dijelaskan sebagai berikut.

1. Ketersediaan infrastruktur menjadi pendukung penting dalam aktivitas perekonomian dan peningkatan produktivitas daerah, terutama terkait aspek distribusi barang dan jasa. Dilihat dalam perspektif daya saing daerah, infrastruktur Kabupaten Wonosobo tergolong rendah, terutama dilihat dari kualitas jalan (masih rendahnya jalan dalam kondisi baik).
2. Secara khusus, kualitas layanan transportasi yang mendukung semua aktivitas pembangunan masih belum optimal. Hal ini dilihat dari kualitas layanan transportasi tersebut meliputi peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar desa dan antar kecamatan, peningkatan keselamatan dan kelancaran perjalanan, serta peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum. Beberapa wilayah kecamatan merupakan titik rawan longsor sehingga perlu dibangun infrastruktur jalan yang tangguh bencana.

d. Daya Saing Iklim Investasi Masih Rendah

Daya saing iklim investasi sangat penting untuk menarik minat investor dan meningkatkan perekonomian suatu daerah. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi daya tarik investasi di suatu wilayah. Berikut ini adalah poin-poin yang menjelaskan faktor-faktor tersebut serta situasi spesifik di Kabupaten Wonosobo.

1. Daya saing iklim investasi dalam perspektif Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dipengaruhi oleh beberapa hal, di antaranya aspek institusi, adopsi teknologi informasi dan komunikasi, serta stabilitas ekonomi makro. Kondisi keamanan, kebijakan pemerintah, norma perilaku yang mempengaruhi pelaku ekonomi, kinerja instansi pemerintah, adopsi teknologi informasi serta pertumbuhan ekonomi sangat mempengaruhi keputusan untuk berinvestasi di suatu daerah.
2. Dilihat dari kondisi keamanan, kinerja pemerintah serta pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonosobo yang cenderung naik serta kapasitas fiskal daerah yang cukup baik menjadi faktor pendorong iklim investasi. Disisi lain, tingkat pengangguran terbuka yang masih cukup tinggi serta belum efisiennya penggunaan investasi ditandai dengan tingginya nilai ICOR (4,24).

B. Analisis IDSD dan Peran Daerah pada Sistem Perwilayahan Dalam Permasalahan dan Isu Strategis

1) Analisis IDSD dalam Permasalahan dan Isu Strategis Kabupaten Wonosobo

Kabupaten Wonosobo dalam rangka untuk mencapai pembangunan dua puluh (20) tahun ke depan, memiliki isu strategis daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengidentifikasi dan mengembangkan potensi yang ada. Isu-isu strategis yang tertuang dalam dokumen RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1. Akselerasi Sumber Daya Manusia Yang Unggul
2. Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Status Sosia Ekonomi
3. Transformasi Menuju Ekonomi Yang Inklusif, Produktif dan Berkelanjutan
4. Pengelolaan Sumber Daya Alam Strategis dan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan
5. Tata Kelola Pemerintah yang Dinamis Ditopang oleh Smart Government
6. Agrobisnis dan Pariwisata yang Unggul
7. Konektivitas Wilayah dan Pembangunan Infrastruktur yang Andal Menuju Kota Layak Huni

Visi Kabupaten Wonosobo sebagaimana yang tertuang di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045, yaitu “Kabupaten Wonosobo sebagai Pusat Agrobisnis dan Pariwisata Terkemuka di Jawa Tengah yang Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan”. Visi serta isu-isu strategis yang dimiliki Kabupaten Wonosobo harus didukung salah satunya dengan penguatan daya saing daerah.

Semua pilar Indeks Daya Saing Daerah harus diarahkan untuk mendukung visi dan isu-isu strategis tersebut. Pilar-pilar yang memperoleh nilai dibawah 4 yaitu infrastruktur, stabilitas ekonomi makro, kesehatan, keterampilan, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, dinamisme bisnis, dan kapabilitas inovasi harus menjadi perhatian prioritas untuk ditingkatkan. Pilar-pilar yang mendapatkan nilai di atas 4 minimal dipertahankan performanya dan kalau memungkinkan juga ditingkatkan.

2) Analisis IDSD dalam Permasalahan dan Isu Strategis Sistem Perwilayahan Wonobanjar

Wilayah Pengembangan (WP) Wonobanjar terdiri dari Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara. Arah pengembangan Wilayah Pengembangan (WP) Wonobanjar yaitu:

- a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dataran tinggi Dieng dalam rangka pengembangan *Geo Tourism* (Kawasan Dieng) yang Terintegrasi dengan Kawasan Borobudur

Pengembangan transportasi diarahkan pada peningkatan aksesibilitas, konektivitas, kelancaran, dan keselamatan antar wilayah serta antar moda yang menghubungkan KSPN Dieng dengan Kawasan Borobudur. Koridor strategis Kertek Wonosobo–Banjarnegara–Klampok yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi memerlukan sistem transportasi publik yang efisien dan terintegrasi. Potensi revitalisasi jalur rel nonaktif Purwokerto–Wonosobo menjadi salah satu peluang utama penguatan konektivitas berbasis kereta api. Selain itu, perbaikan kualitas jalan penghubung, khususnya di ruas sabuk Gunung Sumbing, perlu dipercepat guna menunjang kelancaran logistik dan mobilitas wisatawan. Arah pengembangan difokuskan pada peningkatan infrastruktur jalan, modernisasi transportasi publik, serta integrasi jaringan dan simpul transportasi antar kawasan pariwisata prioritas.

- b. Peningkatan akses kawasan serta kualitas destinasi wisata dengan tetap memperhatikan kesesuaian tata ruang wilayah

Dengan potensi unggulan seperti tradisi Ruwatan Rambut Gimbal dan status sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Dieng memiliki kekuatan sebagai destinasi geo-cultural tourism. Namun demikian, pengembangan sektor pariwisata masih terkendala oleh rendahnya akses pembiayaan swasta, kualitas SDM, dan minimnya sinergi lintas sektor. Oleh karena itu, strategi diarahkan pada penguatan kapasitas kelembagaan, fasilitasi pembiayaan untuk pelaku pariwisata lokal, peningkatan kompetensi SDM, serta integrasi promosi digital, pendidikan kepariwisataan, dan pemasaran destinasi. Hal ini untuk memastikan bahwa potensi pariwisata Dieng benar-benar dikelola secara berkelanjutan, inklusif, dan berbasis komunitas lokal.

- c. Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian dalam rangka menyokong perekonomian daerah.

Wilayah Wonosobo–Banjarnegara memiliki potensi tinggi dalam sektor hortikultura (kentang Dieng), peternakan berbasis pakan lokal, dan budidaya perikanan air tawar dari Waduk Wadaslintang. Ketersediaan SMK pertanian dan kehutanan menjadi aset penting dalam pembangunan kapasitas SDM sektor ini. Namun demikian, pengembangan hilirisasi produk masih terkendala oleh akses infrastruktur irigasi dan jalan produksi yang belum optimal, serta rendahnya akses pembiayaan swasta. Arah pengembangan difokuskan pada integrasi program hilirisasi berbasis kawasan, peningkatan infrastruktur penunjang produksi, penguatan pembiayaan dan kemitraan industri, serta kolaborasi antara lembaga pendidikan, pelaku usaha, dan pemerintah daerah, guna menciptakan sistem pangan lokal yang tangguh dan bernilai tambah tinggi. Adapun analisis gap peran dan kapasitas Kabupaten Wonosobo dalam Wilayah Pengembangan (WP) Wonobanjar adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Analisis Gap, Peran dan Nilai IDSD Kabupaten Wonosobo dalam WP Wonobanjar

Peran Daerah Dalam Pembangunan	Kapasitas Wonosobo	Nilai IDSD Kabupaten Wonosobo	Gap/Isu
Peningkatan aksesibilitas, konektivitas, kelancaran dan keselamatan serta integrasi antar moda jaringan dan simpul transportasi KSPN Dieng dan <i>Geo Tourism</i> Dieng yang terintegrasi dengan Kawasan Borobudur	1. Terdapat jalur rel kereta api nonaktif lintas Purwokerto Wonosobo yang berpotensi untuk direvitalisasi. 2. Tersedia layanan transportasi angkutan umum baik untuk kawasan perkotaan maupun pedesaan, meskipun masih terbatas dari sisi jangkauan dan kualitas layanan	Kualitas infrastruktur jalan Wonosobo Banjarnegara memiliki nilai rendah	Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan penataan sistem transportasi pada kawasan KSPN Dieng

Peran Daerah Dalam Pembangunan	Kapasitas Wonosobo	Nilai IDSD Kabupaten Wonosobo	Gap/Isu
	3. Koridor perkotaan Kertek Wonosobo berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, yang memerlukan dukungan sistem transportasi yang efisien dan berkelanjutan. 4. Pemenuhan fasilitas keselamatan pada ruas jalan sabuk Gunung Sumbing yang menghubungkan Wonosobo Banjarnegara, sebagai bagian dari penguatan konektivitas antar wilayah dan destinasi		
Peningkatan Daya Saing dan kualitas sektor pariwisata KSPN Dieng dan <i>Geo Tourism</i>	1. Memiliki daya Tarik wisata unggulan berbasis budaya lokal, seperti tradisi Ruwatan Rambut Gimbal Dieng, yang menjadi ikon pariwisata budaya khas kawasan 2. Kawasan memiliki potensi wisata geologis (Geo Park) dan status sebagai KSPN, menjadikannya salah satu destinasi prioritas nasional	1. Ketersediaan tenaga kerja sektor pariwisata cukup prospektif, dengan potensi pengembangan kompetensi SDM lokal 2. Rendahnya persentase kredit swasta terhadap PDRB Harga Berlaku dengan rata rata 3,14 3. Nilai institusi daerah tergolong tinggi (rata rata 4,76), mencerminkan kualitas tata kelola, kolaborasi, dan kapasitas kelembagaan daerah yang mendukung	Pemanfaatan potensi belum optimal karena belum sepenuhnya didukung oleh akses keuangan, kualitas SDM pariwisata, serta integrasi lintas sektor (pendidikan pariwisata, promosi digital, dan pemasaran destinasi)

Peran Daerah Dalam Pembangunan	Kapasitas Wonosobo	Nilai IDSD Kabupaten Wonosobo	Gap/Isu
Peningkatan kapasitas produksi dan hilirisasi sektor pertanian, kehutanan, daging serta perikanan budidaya	1. Sentra komoditas hortikultura unggulan, khususnya kentang di dataran tinggi Dieng 2. Potensi peternakan lokal dan ketersediaan pakan ternak yang dapat dikembangkan berbasis kearifan lokal 3. Waduk Wadaslintang sebagai sumber utama perikanan air tawar dan budidaya ikan	1. Nilai institusi tinggi (rata rata 4,76) mendukung kolaborasi dan pelaksanaan program pertanian terpadu 2. Nilai infrastruktur (3,01) belum optimal, khususnya infrastruktur irigasi dan jalan produksi ke sentra pertanian dataran tinggi 3. Akses pasar dan pembiayaan swasta masih rendah, tercermin dari rendahnya rasio kredit swasta terhadap PDRB (3,14)	1. Terdapat ketimpangan antara potensi unggulan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan di wilayah Wonosobo dengan rendahnya dukungan infrastruktur pendukung, akses pembiayaan, dan kapasitas hilirisasi produk. 2. Belum ada pendidikan formal berbasis pertanian seperti SMK jurusan pertanian sebagai dukungan kapasitas SDM.

Sumber: Hasil Analisis, 2025

BAB III

ANALISIS ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PRODUKTIVITAS BERPERAN

A. Terobosan Strategi Pembangunan dalam Pengembangan Produktivitas Berperan

Pemerintah Kabupaten Wonosobo memetakan beberapa upaya super prioritas untuk merespons beberapa isu strategis tersebut. Pemetaan upaya prioritas ini sekaligus mengindikasikan upaya Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk menemukan terobosan dan inovasi-inovasi untuk mengubah keadaan dengan cara-cara yang baru. Strategi baru ini diharapkan dapat mengubah ritme pembangunan yang selama ini dilakukan (*game changer*) sehingga dapat menghasilkan dampak yang lebih signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Upaya super prioritas yang tercantum dalam RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1) Kolaborasi Pengarusutamaan Agrobisnis dan Pariwisata

Kolaborasi Pengarusutamaan Agrobisnis dan Pariwisata menjadi salah satu prioritas demi tercapainya misi pertama yaitu mewujudkan agrobisnis dan pariwisata yang unggul, kreatif, inovatif, dan berkelanjutan. Agrobisnis dan pariwisata yang dikelola secara kolaboratif akan menciptakan sinergi yang memperkuat nilai tambah pada sektor sektor tersebut. Pengarusutamaan agrobisnis dan pariwisata dimulai dari keluarga, integrasi muatan lokal pada semua jenjang dan jenis pendidikan, penyelenggaraan pemerintahan, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan. Dukungan dan komitmen dari berbagai pihak akan berdampak besar terhadap tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat karena dapat memudahkan akses pelaku industri pada pasar yang lebih luas dan mengurangi tantangan yang terjadi pada sektor agrobisnis dan pariwisata.

2) Hilirisasi Industri Pertanian dan Ekonomi Sirkular

Hilirisasi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi lokal dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Hilirisasi industri pertanian dan pengembangan ekonomi sirkular menjadi *game changer*

pada misi pertama yaitu mewujudkan agrobisnis dan pariwisata yang unggul, kreatif, inovatif, dan berkelanjutan karena membawa terobosan baru dalam pengelolaan sektor-sektor ekonomi unggulan. Untuk itu beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain; pemetaan komoditas pertanian sesuai kondisi geografis; identifikasi jenis komoditas pertanian yang dapat dihilirisasikan; pengembangan infrastruktur penunjang pertanian dan sarana prasarana pertanian; pengembangan teknologi digital dan inovasi melalui pendampingan dan pengembangan keterampilan para wirausaha lokal serta mengembangkan ekonomi sirkular; penguatan sumber daya manusia; kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan industri lokal termasuk mempromosikan produk lokal baik di tingkat regional maupun nasional; kerjasama dan pengembangan kemitraan antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat.

Pengembangan ekonomi sirkular dilakukan melalui optimalisasi sumber daya, penggunaan bibit unggul, penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan pertanian, pengolahan produk industri berbasis komoditas pertanian, pengurangan limbah dan polusi dengan mempertahankan penggunaan faktor-faktor produksi selama mungkin sehingga ekspansi lahan pertanian dan konversi lahan pertanian untuk peruntukkan lain dapat dikurangi.

3) Infrastruktur Pendukung Agrobisnis dan Pariwisata

Peningkatan infrastruktur pendukung agrobisnis dan pariwisata terkait konektivitas sentra produksi pertanian dan destinasi pariwisata sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan akses terhadap layanan. *Game changer* ini membantu pencapaian misi kedua yaitu mewujudkan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan. Perencanaan wilayah terintegrasi yang menghubungkan perdesaan dan perkotaan dapat didorong dengan mengidentifikasi peluang pembangunan koridor-koridor ekonomi berbasis pertanian dan pariwisata. Agenda super prioritas ini antara lain dapat difokuskan pada membangun dan meningkatkan jaringan jalan pada koridor penghubung sentra produksi pertanian dan destinasi pariwisata prioritas serta menyediakan transportasi yang terjangkau dan efisien.

Selain konektivitas transportasi, koneksi terhadap jaringan internet di daerah-daerah sentra produksi pertanian dan destinasi pariwisata juga menjadi

agenda super prioritas yang mendukung pencapaian agenda-agenda super prioritas lain. Pemerintah daerah dapat menyediakan program pendanaan dan pembiayaan yang mendukung proyek-proyek infrastruktur di daerah sentra produksi pertanian dan destinasi pariwisata sebagai bagian pengembangan pusat-pusat ekonomi agrobisnis maupun pariwisata untuk menarik investasi dan meningkatkan aksesibilitas.

4) Transformasi Digital Sektor Publik

Transformasi digital dalam pengelolaan sektor publik membantu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas sesuai dengan misi ketiga RPJPD. Implementasi sistem *e-government* akan terus ditingkatkan untuk mengurangi rantai layanan birokrasi dan memudahkan administrasi serta mendorong keterbukaan sektor publik. Transformasi digital juga akan membantu penguatan kelembagaan utamanya pada sektor agrobisnis dan pariwisata.

Beberapa strategi yang akan diterapkan antara lain optimalisasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) atau *e-government*. Guna mempercepat dan membuat birokrasi menjadi lebih efisien, penggunaan Big Data dan Kecerdasan Buatan (AI) juga harus semakin dipopulerkan. Selain mendorong pelayanan yang lebih cepat dan efektif, pemanfaatan teknologi dalam mendorong partisipasi masyarakat juga menjadi bagian dari agenda super prioritas. Lebih lanjut bahkan teknologi *blockchain* dapat diadopsi untuk memastikan transparansi dan keamanan transaksi pemerintahan seperti manajemen kontrak, pelacakan dana publik, sistem insentif pegawai, hingga pemilihan umum. Untuk memungkinkan itu semua terlaksana, peningkatan kapasitas SDM birokrasi sangat diperlukan agar pegawai pemerintah mampu mengelola dan memanfaatkan teknologi secara efektif

5) Reformasi Sumber Pendapatan Asli Daerah

Reformasi sumber pendapatan asli daerah merujuk pada upaya yang dilakukan untuk memperbaiki, memperluas, dan mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan daerah. Saat ini pendapatan asli daerah Kabupaten Wonosobo baru menyumbang sekitar 14% dari total pendapatan daerah. Upaya super prioritas untuk mengubah kondisi tersebut antara lain dapat dilakukan melalui;

- a. Ekstensifikasi pendapatan asli daerah dengan mengidentifikasi dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan baru yang belum dimanfaatkan secara optimal;
- b. Optimalisasi sumber pendapatan asli daerah dengan mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi;
- c. Pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi dalam proses bisnis untuk memaksimalkan pendapatan dari sumber yang ada;
- d. Evaluasi dan penyesuaian tarif pajak untuk memastikan keadilan dan efektivitas dalam pengumpulan pendapatan;
- e. Pengembangan sistem pengawasan dan penagihan yang lebih baik untuk memastikan kepatuhan terhadap pembayaran pajak dan retribusi;
- f. Kerjasama dengan sektor swasta untuk mengembangkan proyek proyek yang dapat menghasilkan pendapatan;
- g. Identifikasi dan pemanfaatan aset yang tidak produktif atau kurang dimanfaatkan.

Melalui reformasi sumber pendapatan asli daerah, diharapkan dapat mencapai kemandirian fiskal, meningkatkan pendapatan, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

6) Pengentasan Kemiskinan Terintegrasi

Pengentasan kemiskinan terintegrasi berbasis Satu Data Wonosobo merupakan suatu upaya dalam rangka mendorong pengentasan kemiskinan yang lebih efektif demi mewujudkan pembangunan sosial yang inklusif serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing sesuai dengan misi keempat RPJPD Kabupaten Wonosobo periode 2025-2045. Penyelenggaraan Satu Data Wonosobo dapat membantu pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih terarah. Satu Data Wonosobo dalam pengentasan kemiskinan terintegrasi akan meningkatkan ketepatan sasaran, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas program. Beberapa aspek yang perlu ditekankan dalam penerapan pengentasan kemiskinan terintegrasi berbasis Satu Data Wonosobo antara lain; pencatatan data terpadu yang terintegrasi berbasis teknologi dan penerapan standar keamanan dan privasi yang tinggi. Satu Data Wonosobo dalam implementasinya disinkronisasikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional

(DTSEN). Hal ini penting dilakukan agar pendataan di Satu Data Wonosobo akurat dan valid.

Pengentasan kemiskinan terintegrasi juga berfokus pada intervensi berbasis tuntas keluarga sesuai dengan diagnosa dan kerentanan yang dialami. Fokus pengentasan kemiskinan terintegrasi berbasis tuntas keluarga adalah peningkatan kualitas hidup kelompok fakir miskin melalui pemberian jaminan sosial dan kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan status pendidikan, kemudahan untuk mengakses sumber sumber ekonomi dan pemberdayaan menuju kemandirian ekonomi. Strategi tuntas keluarga ini juga diikuti dengan peningkatan sarana dan prasarana wilayah serta penyediaan sarana transportasi untuk kemudahan mengakses layanan publik.

7) Ketahanan Keluarga dan Kesenjangan Gender

Ketahanan keluarga dan kesetaraan gender merupakan aspek penting dalam membangun masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan misi keempat RPJPD Kabupaten Wonosobo periode 2025-2045, sehingga perlu menjadi upaya super prioritas. Ketahanan keluarga dapat dimaknai sebagai kemampuan menghadapi dan mengelola masalah dalam situasi sulit agar fungsi keluarga tetap berjalan dengan harmonis, untuk mencapai kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin anggotanya sehingga menciptakan SDM yang unggul dan berintegritas.

Peningkatan ketahanan keluarga difokuskan pada membangun keluarga berkualitas agar dapat hidup sehat, kemandirian ekonomi, berpendidikan tinggi, memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi dan perubahan namun tetap menjaga nilai budaya lokal dan kearifan lokal, berkarakter dan memiliki kapabilitas untuk perencanaan pembangunan keluarga serta mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Ketahanan keluarga juga bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang menghormati kesetaraan gender, inklusivitas dan berprinsip keadilan. Pemerintah daerah berperan dalam pemenuhan hak dan perlindungan kelompok rentan seperti anak, perempuan, lansia dan disabilitas, meningkatkan kesetaraan gender, memberikan ruang dan akses partisipasi publik dalam pembangunan inklusif serta pemberdayaan masyarakat.

Kesehatan difokuskan pada pemenuhan layanan kesehatan berbasis siklus hidup secara inklusif, pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan status kesehatan, peningkatan inovasi layanan kesehatan yang mendukung pariwisata, pemanfaatan layanan digital untuk mempermudah akses, pemenuhan jaminan kesehatan serta peningkatan sistem ketahanan kesehatan untuk menghadapi ancaman penyakit baru.

8) Pertanian dan Pariwisata Ramah Lingkungan

Pertanian dan pariwisata ramah lingkungan adalah suatu pendekatan yang memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, konservasi lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menjadi upaya super prioritas Kabupaten Wonosobo mengingat tingginya potensi ancaman degradasi lingkungan akibat pola tanam dan pemanfaatan lahan pertanian selama ini yang kurang memperhatikan aspek keberlanjutan. Upaya strategis ini mendukung pencapaian misi kelima yaitu mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan melalui penerapan praktik-praktik pertanian berkelanjutan, seperti rotasi tanaman, penggunaan tanaman penutup tanah, penggunaan pupuk organik dan pembatasan penggunaan pestisida, dan pengolahan tanah sesuai kontur.

Pengembangan industri pertanian akan diintegrasikan dengan pengembangan pariwisata berbasis komunitas. Pengintegrasian ini sekaligus sebagai bagian dari diversifikasi tujuan wisata untuk mengurangi tekanan pada destinasi yang overload pengunjung. Hal tersebut akan didorong dengan kolaborasi antar destinasi, kemitraan antara sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil untuk mendukung pembangunan pariwisata berkelanjutan. Beberapa hal taktis yang akan dilakukan antara lain melakukan sertifikasi dan standarisasi usaha-usaha wisata, mendorong pelaku industri pariwisata untuk menerapkan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan, serta mengkampanyekan etika lingkungan dan tanggung jawab sosial sebagai bagian integral dari pengembangan industri pariwisata dan pertanian.

9) Reformasi Pengelolaan Sampah

Reformasi pengelolaan sampah merupakan suatu upaya sistematis untuk memperbaiki cara sampah dikelola dari hulu ke hilir dengan tujuan menciptakan sistem yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Dalam reformasi

pengelolaan sampah implementasi terhadap paradigma baru terhadap konteks pengelolaan sampah, yaitu ekonomi sirkular. Ekonomi sirkular tidak hanya meliputi konteks pengelolaan sampah saja, tetapi juga konteks efisiensi sumber daya dan perhatian terhadap rantai nilai.

Strategi pengelolaan ini yang tepat akan berkontribusi pada kesejahteraan sosial masyarakat dan optimalisasi penggunaan sumber daya. Upaya ini juga sesuai dengan pencapaian misi kelima tentang Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang Berkelanjutan. Reformasi pengelolaan sampah harus dilakukan secara holistik dan sejalan dengan pendekatan *Quick Wins* yang dilakukan Pemerintah meliputi peningkatan kualitas perencanaan dan partisipasi pemangku kepentingan; perbaikan pengelolaan data persampahan; peningkatan kapasitas pemangku kepentingan; fleksibilitas kelembagaan; pendanaan; dan *binding mechanism*.

Upaya super prioritas (*game changer*) tersebut apabila dikaitkan dengan pilar-pilar Indeks Daya Saing Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Keterkaitan Upaya Super Prioritas (*Game Changer*) dan Pilar IDSD

No.	Upaya Super Prioritas (<i>Game Changer</i>)	Pilar IDSD
1.	Kolaborasi Pengarusutamaan Agrobisnis dan Pariwisata	Dinamisme Bisnis Kapabilitas Inovasi
2.	Hilirisasi Industri Pertanian dan Ekonomi Sirkular	Pasar produk Keterampilan
3.	Infrastruktur Pendukung Agrobisnis dan Pariwisata	Infrastruktur Ukuran pasar
4.	Transformasi Digital Sektor Publik	Adopsi TIK Institusi
5.	Reformasi Sumber Pendapatan Asli Daerah	Sistem Keuangan
6.	Pengentasan Kemiskinan Terintegrasi	Pasar Tenaga Kerja
7.	Ketahanan Keluarga dan Kesenjangan Gender	Kesehatan Keterampilan
8.	Pertanian dan Pariwisata Ramah Lingkungan	Stabilitas Ekonomi Makro
9.	Reformasi Pengelolaan Sampah	Kapabilitas Inovasi Kesehatan

Sumber: Hasil Analisis, 2025

B. Prioritas Program Pembangunan dalam Pengembangan Produktivitas Berperan

Berikut prioritas program pembangunan Kabupaten Wonosobo dalam pengembangan produktivitas berperan:

Tabel 3.2 Program Prioritas Pembangunan

No.	Strategi Pembangunan	Program Prioritas
1.	Infrastruktur	
	a. Peningkatan Jalan	1. Peningkatan infrastruktur layanan dasar, permukiman, konektivitas wilayah dan pendukung agrobisnis, dan pariwisata; 2. Peningkatan jalan koridor menuju desa prioritas 1 (satu) penanganan kemiskinan 3. Peningkatan jalan koridor sabuk sumbing seksi awal.
	b. Peningkatan Jaringan Irigasi Kabupaten prioritas pada kawasan sentra produksi pertanian padi unggulan	Revitalisasi jaringan irigasi primer dan sekunder
2.	Sistem Keuangan	
	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	1. Penerapan secara bertahap e-retribusi pada kawasan pariwisata 2. Penerapan secara bertahap e-parkir pada kantong-kantong potensial 3. Update data instrumen pajak bumi dan bangunan 4. Memanfaatkan barang milik daerah yang belum digunakan 5. Pemakaian <i>tapping box</i> untuk rumah dan penginapan 6. Peningkatan pajak barang dan jasa tertentu 7. Peningkatan opsen PKB dan BBNKB 8. Menambah titik-titik pemasangan reklame
3.	Stabilitas Ekonomi Makro	1. Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDA) 2. Pemberdayaan Koperasi Merah Putih
4.	Keterampilan Pasar dan Tenaga Kerja	1. Inkubasi bisnis bagi wirausaha 2. Standarisasi pelatihan, sertifikasi bagi peserta pelatihan dan penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi 3. Integrasi Kurikulum Muatan Lokal Agrobisnis dan Pariwisata
5.	Kapabilitas Inovasi	1. <i>Penyelenggaraan Krenova</i> 2. <i>Exhibition Space</i> (Ruang Pameran Produk Lokal). 3. Memaksimalkan Wonosobo <i>Creative Center (Creative Hub)</i>

Sumber: Hasil Analisis, 2025

C. Kebutuhan Pembangunan Sistem Perwilayahan

Dalam rangka mendukung pembangunan sistem perwilayahan Wonobanjar, maka kebutuhan pembangunan Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Agrobisnis

Dalam rangka mendukung pengembangan agrobisnis, kebutuhan Kabupaten Wonosobo dalam pembangunan sistem perwilayahan antara lain:

- a) Peningkatan pelayanan transportasi umum pendukung kegiatan agrobisnis dan pariwisata
- b) Peningkatan kemantapan jalan kabupaten prioritas pada jalan koridor pendukung pariwisata dan pertanian
- c) Penyiapan kerangka regulasi yang mendukung inovasi di sektor agrobisnis dan pariwisata
- d) Pengembangan riset dan inovasi di bidang pertanian dan industri pengolahan
- e) Penyiapan teknologi yang mendukung praktik pertanian berkelanjutan
- f) Meningkatkan akses permodalan bagi para pelaku agrobisnis
- g) Penyediaan skema pendanaan riset dan inovasi bagi sektor agrobisnis dan pariwisata berkelanjutan
- h) Peningkatan kapasitas petani dalam menerapkan praktik pertanian berkelanjutan dan penerapan teknologi inovatif

2. Pengembangan Pariwisata

Dalam rangka mendukung pengembangan pariwisata, kebutuhan Kabupaten Wonosobo dalam pembangunan sistem perwilayahan antara lain:

- a) Peningkatan pelayanan transportasi umum pendukung kegiatan agrobisnis dan pariwisata
- b) Peningkatan kemantapan jalan kabupaten prioritas pada jalan koridor pendukung pariwisata dan pertanian
- c) Pemetaan dan pengembangan destinasi wisata baru pada kawasan sentra produksi pertanian
- d) Pengembangan paket-paket wisata unggulan dan tematik pengembangan *Geopark* Nasional Dieng, serta pengembangan *MICE* (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*)

- e) Meningkatkan akses permodalan bagi para pelaku pariwisata dan sektor-sektor jasa pendukungnya.
- f) Meningkatkan kompetensi pelaku pariwisata melalui pendidikan dan pelatihan
- g) Pengembangan event dan festival pariwisata dengan skala yang beragam
- h) Menciptakan branding yang kuat dan unik untuk setiap destinasi super prioritas untuk menarik minat wisatawan

BAB IV

TATA KELOLA DAN DUKUNGAN DALAM PENGUATAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS DAERAH

A. Rekomendasi Agenda Kerjasama dan Kolaborasi dalam Penguatan Produktivitas Skala Kewilayahan

Kabupaten Wonosobo, dengan pesona agrowisata dan kekayaan alamnya, menyimpan potensi produktivitas yang bisa dioptimalkan. Dari kopi dan carica yang harum, sayuran hortikultura yang segar, hingga kerajinan tangan yang bernilai seni tinggi, setiap wilayah memiliki potensi keunggulannya masing-masing. Namun, potensi yang tersebar ini seringkali belum terkelola secara optimal untuk menghadirkan kemakmuran yang inklusif. Tantangan klasik seperti keterbatasan akses pasar, infrastruktur pendukung, modal, dan kapasitas SDM masih menjadi hambatan. Di sinilah **tata kelola kolaboratif dan sistem dukungan yang terintegrasi** menjadi kunci penentu. Penguatan produktivitas di Kabupaten Wonosobo bukan hanya tentang meningkatkan output, tetapi lebih tentang membangun **ekosistem kewilayahan** yang mampu menghubungkan titik-titik potensi menjadi sebuah mata rantai nilai yang kuat dan berkelanjutan.

Agar upaya ini tidak lagi parsial dan temporer, diperlukan agenda bersama yang sistematis. Berikut adalah rekomendasi agenda kerjasama dan kolaborasi yang dapat menjadi peta jalan menuju Wonosobo yang lebih produktif dan berdaulat:

1) Pilar Pertama: Membangun Tata Kelola Kolaboratif yang Inklusif

Langkah pertama dan terpenting adalah menggeser paradigma dari pendekatan *sectoral* menuju pendekatan *kewilayahan* yang melibatkan semua pelaku. Tata kelola yang baik diawali dengan pembentukan **Platform Kolaborasi Multipihak**. Forum ini harus menghimpun Pemerintah Daerah (seluruh OPD terkait), akademisi, asosiasi usaha (KADIN, HIPMI), perbankan, pelaku UMKM, hingga kelompok tani. Forum ini berfungsi sebagai *nerve center* untuk koordinasi, perencanaan bersama, dan penyelesaian masalah secara cepat, memastikan kebijakan dan program tidak berjalan sendiri-sendiri.

Tata kelola kolaboratif juga harus direfleksikan dalam kebijakan nyata. Misalnya, dengan menciptakan **skema Pelayanan Usaha Terpadu**

Kewilayahan untuk klaster unggulan. Satu loket atau sistem terpadu dapat mengurus perizinan, sertifikasi halal, label P-IRT, hingga bantuan promosi, yang melibatkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kesehatan, dan Pariwisata secara bersamaan. Penguatan kelembagaan kelompok menjadi Koperasi atau Badan Usaha yang profesional juga adalah bentuk tata kelola mikro yang krusial, menjadikan mereka subjek yang mandiri dan *bankable*.

2) Pilar Kedua: Merancang Sistem Dukungan yang Terintegrasi dan Berpihak pada Pelaku

Tata kelola yang baik harus diwujudkan dalam dukungan yang nyata dan tepat sasaran. Dukungan ini harus bersifat *enabling*, yaitu memampukan pelaku utama (petani, perajin, pelaku wisata) untuk memproduksi dengan lebih efisien dan berdaya saing.

- a. **Dukungan Infrastruktur Berskala Klaster:** Kolaborasi Pemerintah dan Swasta (KPBU) sangat diperlukan untuk membangun infrastruktur pendukung produktivitas, seperti *Cold Chain System* untuk komoditas hortikultura dan ternak perah, serta **Sentra Pengolahan dan Pengemasan Bersama** (*Processing Center*) untuk carica, kopi, dan purwaceng. Ini akan menyelesaikan masalah pasca panen, standarisasi kualitas, dan meningkatkan nilai tambah di wilayah sendiri.
- b. **Dukungan Finansial Inovatif:** Kemitraan antara Dinas Koperasi dan UKM, perbankan perlu melahirkan skema kredit/pembiayaan dengan jaminan kolektif berbasis klaster atau kelompok. Skema *crowdfunding* lokal dan pendampingan keuangan juga dapat dikembangkan untuk usaha-usaha rintisan.
- c. **Dukungan Teknologi dan Kapasitas SDM:** Kerjasama dengan dunia akademik melalui program “Desa Inovasi” dapat mendorong adopsi teknologi tepat guna. Selain itu, **Sekolah Kewirausahaan Wilayah** yang kurikulumnya disusun bersama praktisi, akademisi, dan pemerintah dapat mencetak pelaku usaha yang andal secara manajerial dan digital.

3) Pilar Ketiga: Penguatan Kerjasama *Pentahelix*

Kerjasama *pentahelix* merupakan model kolaborasi yang melibatkan lima elemen yang terdiri dari pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media dan bertujuan untuk menciptakan sinergi dalam pembangunan daerah secara

inklusif, inovatif, dan berkelanjutan. Agenda kerjasama *pentahelix* yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

Pemerintah	•Merumuskan kebijakan dan regulasi yang mendukung optimalisasi kerjasama lintas daerah
Akademisi	•Mengembangkan riset dan inovasi yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah
Dunia Usaha (Pelaku Bisnis)	•Menyediakan investasi untuk pembangunan pada sektor prioritas serta transfer teknologi.
Komunitas	•Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan •Menjadi katalisator dalam menjembatani kebijakan dan inisiatif dengan kebutuhan serta potensi lokal
Media	•Menyebarkan informasi yang obyektif •Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai potensi daerah dan inisiatif pembangunan untuk mendorong produktivitas

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Gambar 4.1 Rekomendasi Agenda Kerjasama *Pentahelix*

4) Pilar Keempat: Pemasaran dan *Branding* sebagai Pemersatu Kewilayahan

Produktivitas hanya bermakna jika hasilnya sampai ke pasar dengan nilai optimal. Di sini, kolaborasi diperlukan untuk menciptakan ***brand* kolektif kewilayahan**. “Kopi Dieng Wonosobo” atau “Carica Premium Wonosobo” dengan standar kualitas dan kemasan yang khas akan lebih kuat di pasar daripada setiap produsen berjuang sendiri. *Platform* pemasaran digital “**Wonosobo Produktif**” dapat menjadi wajah online dari seluruh produk unggulan kabupaten.

Yang tak kalah penting, integrasi antara produktivitas dan pariwisata. **Jalur Wisata Produktif** yang menghubungkan kebun kopi, sentra pengolahan carica, dan galeri kerajinan akan menciptakan pengalaman wisata yang unik sekaligus menjadi saluran pemasaran langsung (*direct selling*). Festival budaya seperti *Dieng Culture Festival* harus menjadi panggung utama untuk memamerkan kekuatan produktif seluruh wilayah.

Penguatan produktivitas kewilayahan di Kabupaten Wonosobo pada dasarnya adalah sebuah proyek kolaborasi besar. Ia membutuhkan tata kelola yang inklusif dan lincah, serta sistem dukungan yang menyeluruh dan berpihak pada

akar rumput. Ketika Pemerintah berfungsi sebagai fasilitator dan regulator yang efektif, dunia usaha sebagai penggerak investasi dan inovasi, akademisi sebagai penyedia solusi teknologi, dan komunitas sebagai pelaku utama yang diberdayakan, maka potensi Kabupaten Wonosobo yang tersebar akan berubah menjadi jejaring produktif yang saling menguatkan. Hasil akhirnya bukan sekadar angka pertumbuhan ekonomi, tetapi terwujudnya kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan, di mana setiap wilayah di Kabupaten Wonosobo merasa menjadi bagian dari kemajuan bersama.

B. Rekomendasi Kebijakan Kelembagaan dan Keuangan Daerah dalam Mendukung Pembangunan dalam Pengembangan Produktivitas Berperan dan Sistem Perwilayahan

Kabupaten Wonosobo, dengan pesona Dieng yang memikat dan kesuburan lereng Sindoro-Sumbing, menyimpan potensi ekonomi yang besar. Namun, tantangan geografis dan keterbatasan sumber daya seringkali membuat pembangunan belum sepenuhnya merata dan berkelanjutan. Untuk melompat lebih tinggi, diperlukan transformasi mendasar dalam cara kita mengelola daerah. Artikel ini merekomendasikan dua pilar utama reformasi: **kebijakan kelembagaan yang agile** dan **kebijakan keuangan yang inovatif**, yang terintegrasi dalam kerangka sistem perwilayahan. Hal mendasar pertama yang perlu dibenahi adalah merombak kelembagaan untuk kolaborasi agar bisa sinergi lintas sektoral. Struktur birokrasi yang kaku sering menghambat inovasi. Saat Dinas Pariwisata fokus pada kunjungan, sementara Dinas Pertanian sibuk dengan produksi, siapakah yang membangun *linkage* antara agrowisata dan nilai tambah hasil pertanian.

Untuk itu, rekomendasi kebijakan kelembagaan berfokus pada:

1. Membentuk Komando Tindak Cepat Berbasis Klaster

Pemerintah Daerah perlu membentuk **Satuan Tugas (Satgas) Pengembangan Klaster Wilayah** yang langsung berada di bawah koordinasi pimpinan daerah. Satgas ini bukan lembaga baru yang gemuk, melainkan tim *task force* yang beranggotakan perwakilan dinas-dinas teknis terkait. Misalnya, untuk Klaster Dieng, Satgas akan diisi oleh unsur Pariwisata, Pertanian, PUPR, dan Lingkungan Hidup. Tugas mereka merancang satu paket program terpadu: dari

pembenahan jalan usaha tani, penguatan kemasan produk kentang, hingga pelatihan *guide* wisata yang juga memahami budaya lokal. Dengan pendekatan ini, setiap wilayah (Klaster Dieng, Wadaslintang, Kota, dan Lereng) memiliki tim khusus yang memahami karakter dan kebutuhan spesifiknya.

2. Memperkuat Ujung Tombak: Desa dan Kecamatan.

Kebijakan makro akan runtuh jika tidak tersambung dengan baik di tingkat tapak. **Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)** harus ditingkatkan kapasitasnya menjadi *social enterprise* yang tangguh—bukan sekadar pengelola parkir, tetapi sebagai *aggregator* produk pertanian atau pengelola paket wisata desa. Di tingkat kecamatan, **Pokja Kecamatan** harus difungsikan sebagai ruang dialog mingguan antara Camat, Koramil, Kapolsek, dan perwakilan pelaku usaha untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan hambatan produktivitas secara cepat.

3. Menciptakan Pusat Inovasi Daerah.

Kemajuan ditentukan oleh teknologi dan SDM. Wonosobo memerlukan sebuah **Wonosobo Innovation Hub** yang menjadi rumah bagi kolaborasi antara akademisi, praktisi, dan pelaku usaha. Hub ini akan menjadi tempat pelatihan digital marketing untuk UMKM, uji coba teknologi irigasi tetap untuk hortikultura, dan inkubasi startup lokal. Lembaga ini akan menjadi mitra strategis DPMPTSP dalam menciptakan iklim berusaha yang modern.

Pilar penting kedua adalah memposisikan anggaran sebagai investasi yang bergerak tidak sekedar biaya. Anggaran daerah (APBD) sering terjebak pada pola rutin dan sektoral. Dana harus dialihkan untuk menjadi *catalyst* pertumbuhan yang terfokus.

1. Mengoptimalkan PAD dengan Cerdas dan Adil.

Di sektor pariwisata, sistem retribusi yang terfragmentasi perlu disatukan dalam skema **"Tourism Fee" terintegrasi** di Dieng. Dana yang terkumpul harus dikelola transparan, dengan porsi tertentu dikembalikan langsung untuk konservasi lingkungan dan pemberdayaan komunitas lokal di kawasan tersebut. Untuk UMKM, sistem retribusi pasar perlu direformasi dengan prinsip kemudahan, sementara potensi pajak hotel dan restoran dapat dioptimalkan dengan basis data yang akurat.

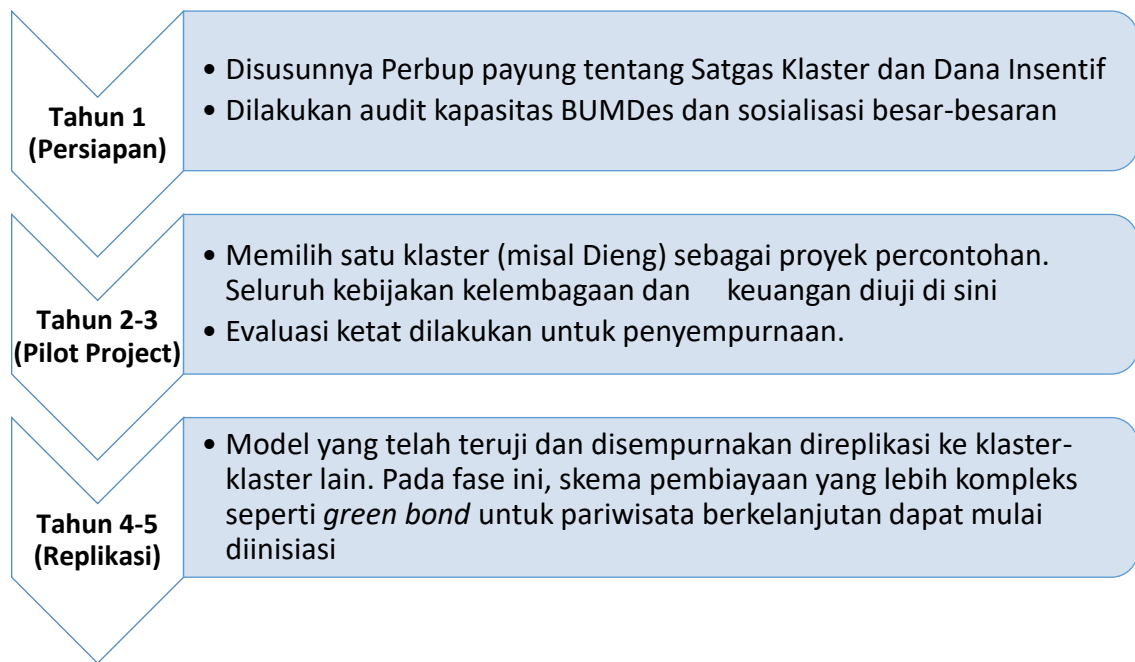
2. Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja dan Klaster (*Place-Based Budgeting*).

Sebagian APBD harus dialokasikan sebagai "**Dana Insentif Klaster**". Dana ini tidak dikelola oleh dinas secara terpisah, tetapi diberikan kepada Satgas Klaster berdasarkan proposal program terpadu dan capaian kinerja sebelumnya. Misalnya, Klaster Lereng Sindoro-Sumbing mengajukan program terpadu pengembangan stroberi organik lengkap dengan *cool storage*, pemasaran digital, dan agrowisata. Jika proposal disetujui, dana dikucurkan dan dieksekusi secara terkoordinasi. Ini mengubah paradigma dari "membeli *input*" menjadi "membeli *outcome*".

3. Merangkul Investasi dan Pembiayaan Kreatif.

Pemerintah Daerah dapat memelopori pembentukan "**Wonosobo Regional Investment Fund**", sebuah pola pendanaan campuran dari APBD, bagi hasil PAD, dan investor sosial. Dana ini digunakan untuk memberikan pinjaman lunak atau penyertaan modal pada usaha-usaha strategis di klaster prioritas. Skema **Kemitraan Publik-Swasta (PPP)** juga dapat digalakkan untuk membangun infrastruktur pendukung produktivitas, seperti *cold chain* logistik pertanian atau pengelolaan air bersih terpadu.

Rekomendasi kebijakan ini bukanlah daftar harapan, melainkan kerangka kerja yang terstruktur. Kunci keberhasilannya terletak pada **komitmen politik (*political will*)** kepemimpinan daerah yang kuat dan konsisten. Kepemimpinan yang berani memutuskan *business-as-usual*, mendorong kolaborasi yang kerap tidak nyaman, dan mengalokasikan ulang anggaran untuk masa depan. Transformasi ini tidak bisa instan. Diperlukan peta jalan bertahap:



Gambar 4.2 Peta Jalan Transformasi

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Dengan kelembagaan yang lincah dan kolaboratif, serta instrumen keuangan yang cerdas dan berorientasi hasil, Wonosobo tidak hanya akan meningkatkan produktivitas ekonominya, tetapi juga melakukannya dengan cara yang inklusif dan berkelanjutan. Setiap wilayah dengan segenap potensi dan keunikannya akan menemukan momentumnya sendiri, digerakkan oleh sistem yang mendukung, untuk berkontribusi pada kemajuan Wonosobo secara keseluruhan. Saatnya menata ulang, untuk lompatan yang lebih jauh.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). (2023). *Data Realisasi Investasi per Provinsi/Kabupaten*. Diakses melalui <https://nswi.bkpm.go.id/>
- Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Jawa Tengah. (2021). *Kajian Potensi dan Arah Pengembangan Ekonomi Kawasan Dataran Tinggi Dieng dan Sekitarnya*. Semarang: Balitbangda Prov. Jateng.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Wonosobo. (2024). *Kabupaten Wonosobo Dalam Angka 2024*. Wonosobo: BPS Kabupaten Wonosobo.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Wonosobo. (2025). *Kabupaten Wonosobo Dalam Angka 2025*. Wonosobo: BPS Kabupaten Wonosobo.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah. (2024). *Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2024*. Semarang: BPS Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah. (2025). *Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2025*. Semarang: BPS Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2023*. Jakarta: BPS RI.
- Bank Indonesia. (2018). *Indeks Daya Saing Daerah (Regional Competitiveness Index)*. Jakarta: Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI.
- Budiharsono, S. (2012). *Analisis Daya Saing Wilayah: Teori dan Aplikasi*. Bogor: IPB Press.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Wonosobo. (2023). *Laporan Realisasi Investasi dan Iklim Usaha Kabupaten Wonosobo*. Wonosobo: DPMPTSP Kab. Wonosobo.
- Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). (2024). *Indeks Daya Saing Daerah 2023*. Jakarta: Deputi Kebijakan Riset dan Inovasi
- Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). (2025). *Indeks Daya Saing Daerah 2024*. Jakarta: Deputi Kebijakan Riset dan Inovasi
- Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. (n.d.). *Data Desa – Data Potensi Desa (PODES) Kabupaten Wonosobo*. Diakses melalui <https://data.desagis.id/>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Data Keuangan Daerah: Realisasi APBD Kabupaten Wonosobo*. Diakses melalui www.djpk.kemenkeu.go.id
- Kementerian PPN/Bappenas. (2020). *Indeks Daya Saing Daerah Berbasis Sustainable Development Goals (SDGs)*. Jakarta: Bappenas.

- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2023). *Statistik Kepariwisataaan*. Diakses melalui <https://statistik.kemenparekraf.go.id/>
- Pemerintah Kabupaten Wonosobo. (2021). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo 2021-2026*. Wonosobo: Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo.
- Pemerintah Kabupaten Wonosobo. (2023). *Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2024*. Wonosobo: BAPPEDA Kab. Wonosobo.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo. (2025). *Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029*.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo. (2024). *Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045*.
- Saputra, A. S., & Kurniawan, B. (2022). "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Daya Saing Daerah di Eks-Karesidenan Kedu". *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 15(1), 45-60.
- Setiawan, H., & Rokhani, R. S. (2020). "Pengaruh Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia terhadap Daya Saing Daerah di Jawa Tengah". *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 11(2), 123-138.
- Website Resmi Pemerintah Kabupaten Wonosobo: <https://www.wonosobokab.go.id/>
- Wijayanti, R., & Prasetyo, A. D. (2021). "Strategi Pengembangan Kluster Unggulan untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah (Studi pada Sektor Hortikultura di Kabupaten Wonosobo)". *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis*. Universitas Diponegoro.